



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA



20
23

BIRO AKUNTABILITAS KINERJA DAN
REFORMASI BIROKRASI

bangga
melayani
bangsa



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023

**BIRO AKUNTABILITAS KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI
2024**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Biro AKRB) Tahun 2023 yang merupakan wujud pertanggungjawaban Biro, sebagai bagian dari institusi Sekretariat Kabinet, terhadap *stakeholders*. Selama tahun 2023, Biro AKRB telah melaksanakan tugas pengelolaan kinerja organisasi dan individu, pengelolaan reformasi birokrasi, pengendalian persuratan, dan ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet dengan sangat baik dan akan terus berupaya meningkatkan kualitas hasil kerja.

LKj Biro AKRB Tahun 2023 menyajikan berbagai upaya capaian kinerja dari sasaran dan indikator kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Biro AKRB Tahun 2023. Penyusunan LKj mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan memperoleh gambaran capaian kinerja Biro AKRB dalam mendukung kinerja organisasi Sekretariat Kabinet selama tahun 2023. Dari segala upaya dan hasil yang kami peroleh sepanjang tahun 2023, kami mengapresiasi seluruh *stakeholder* yang telah menjalin kerja sama yang baik dengan Biro AKRB. Kami berharap agar kerja sama yang baik ini dapat diteruskan dan ditingkatkan agar kualitas layanan menjadi semakin baik.

Biro AKRB akan terus melakukan berbagai langkah untuk memperbaiki kinerja dengan menindaklanjuti rekomendasi dari hasil analisis atas capaian kinerja tahun ini yang termuat dalam LKj Biro AKRB. Laporan ini diharapkan dapat digunakan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Biro AKRB dan seluruh *stakeholders* dalam mencermati berbagai permasalahan, khususnya terkait akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, dan ketatausahaan, serta sebagai bahan acuan dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Dengan demikian, program pada tahun mendatang dapat disusun secara lebih efektif, efisien, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Biro AKRB ini dapat dimanfaatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja.

Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan
Reformasi Birokrasi,



Mita Apriyanti

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Daftar Tabel

iii

Daftar Gambar

iv

Ikhtisar Eksekutif

v

BAB I PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang

1

1.2. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

1

1.3. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

7

1.4. Sistematika Laporan

9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

11

2.1. Rencana Strategis

11

2.2. Indikator Kinerja Utama

12

2.3. Perjanjian Kinerja

13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

16

3.1. Capaian Kinerja

20

3.1.1. Capaian Kinerja Jangka Menengah

20

3.1.2. Capaian Kinerja Tahun 2023

20

3.2. Analisis Penggunaan Sumber Daya

44

3.2.1 Realisasi Anggaran

44

3.2.2. Sumber Daya Manusia

46

3.2.3. Sarana Prasarana

46

BAB IV PENUTUP

47

LAMPIRAN

Lampiran 1: Perjanjian Kinerja Biro AKRB Tahun 2022

Lampiran 2: Matriks Capaian Kinerja Biro AKRB Tahun 2022

Lampiran 3: Penyerapan Anggaran Biro AKRB Tahun 2022

Lampiran 4: Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Biro
AKRB Tahun 2022

Lampiran 5: Formulir Checklist Muatan Substansi Laporan Kinerja
Biro AKRB Tahun 2023

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	IKU Biro ACRB	12
Tabel 2.2	PK Biro ACRB Tahun 2023	14
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Jangka Menengah Biro ACRB	20
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Biro ACRB Tahun 2022 dan 2023	21
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Pertama Sasaran Pertama Tahun 2022 dan 2023	23
Tabel 3.4	Nilai SAKIP Kedeputan di Lingkungan Sekretariat Kabinet	23
Tabel 3.5	Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja per Komponen Tahun 2022	24
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kedua Sasaran Pertama Tahun 2021 s.d. 2023	28
Tabel 3.7	Tindak Lanjut Hasil Survei Tingkat Pemanfaatan Dokumen/Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023	29
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Ketiga Sasaran Pertama Tahun 2021 s.d. 2022	31
Tabel 3.9	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022	31
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Keempat Sasaran Pertama Tahun 2021, 2022 dan 2023	32
Tabel 3.11	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Kedua Tahun 2022 dan 2023	35
Tabel 3.12	Aspek Pelayanan dalam Survei Pelayanan Ketatausahaan dan Persuratan	36
Tabel 3.13	Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Layanan Ketatausahaan dan Persuratan Tahun 2022 dan 2023	36
Tabel 3.14	Saran dan Tindak Lanjut	39
Tabel 3.15	Nilai Komponen Pengungkit PMPRB Kedeputan Bidang Administrasi Tahun 2022	40
Tabel 3.16	Rekapitulasi Jumlah Revisi Anggaran Biro ACRB Tahun 2023	42
Tabel 3.17	Capaian Indikator Kinerja Pertama Sasaran Keempat Tahun 2023	42
Tabel 3.18	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Keempat Tahun 2022 dan 2023	42
Tabel 3.19	Capaian Indikator Kinerja Kedua Sasaran Keempat Tahun 2023	43
Tabel 3.20	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Keempat Tahun 2022 dan Tahun 2023	43
Tabel 3.21	Realisasi Anggaran Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2023	44
Tabel 3.22	Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Biro ACRB Tahun 2023	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Analisis SWOT Biro AKRB	2
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Biro AKRB	9
Gambar 2.1	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis	11
Gambar 3.1	Tampilan SIKT2	17
Gambar 3.2	Tampilan <i>Dashboard</i> Capaian Kinerja Biro AKRB	17
Gambar 3.3	Gambar SKPOnline2	19
Gambar 3.4	Gambar aplikasi e-Kinerja	19
Gambar 3.5	Kategori Pencapaian Kinerja	21
Gambar 3.6	Interpretasi Skor Penilaian Survei	26
Gambar 3.7	Hasil Perbandingan Survei Pemanfaatan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022-2023	27
Gambar 3.8	Tren Tingkat Pemanfaatan Dokumen Akuntabilitas Kinerja 2019-2023	28
Gambar 3.9	Hasil Survei Pemanfaatan Dokumen Reformasi Birokrasi	33
Gambar 3.10	Tren Tingkat Pemanfaatan Dokumen Reformasi Birokrasi 2019-2023	34
Gambar 3.11	Capaian Indikator Kinerja Pertama Sasaran Ketiga Tahun 2023	39
Gambar 3.12	Capaian Indikator Kinerja Kedua Sasaran Ketiga Tahun 2022	41
Gambar 3.13	Diagram Profil Pejabat dan Pegawai Biro AKRB Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	46
Gambar 3.14	Diagram Profil Pejabat dan Pegawai Biro AKRB Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023	46

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Biro AKRB) Tahun 2023 menyajikan berbagai upaya dan hasil atau capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), beserta analisisnya. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tahun 2023, akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet, Biro AKRB memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari sasaran strategis tersebut, Biro AKRB telah melakukan revaluasi terhadap IKU Biro sebagai upaya memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik guna memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang lebih baik, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta mempertimbangkan hasil evaluasi KemenPANRB pada tahun 2022, sehingga pada Perjanjian Kinerja (PK) Biro AKRB tahun 2023 memiliki 4 (empat) sasaran strategis yang keberhasilan capaiannya diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja utama dan 4 (empat) indikator kinerja tambahan.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Biro AKRB tahun 2023 adalah sebesar **110,89% (Memuaskan)**. Capaian tersebut merupakan rata-rata capaian dari 4 (empat) sasaran strategis Biro AKRB yang diukur dengan 9 (sembilan) indikator kinerja dengan rincian 7 (tujuh) indikator kinerja memperoleh capaian dengan kategori "Memuaskan" (capaian $\geq 100\%$) dan 2 (dua) indikator kinerja memperoleh capaian dengan kategori "Sangat Baik" (capaian $85\% - < 100\%$). Berikut ini gambaran pencapaian Biro AKRB tahun 2022 dan 2023.

Capaian Kinerja Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
Sasaran Strategis	2022	2023
1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	113,27%	104,80%
2. Terselenggaranya layanan persuratan serta ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet	100,02%	100,61%
3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan SAKIP dan RB Kedeputan Bidang Administrasi	112,50%	125%
4. Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang efektif	109,96%	114,13%
Rata-rata	108,94%	110,89%

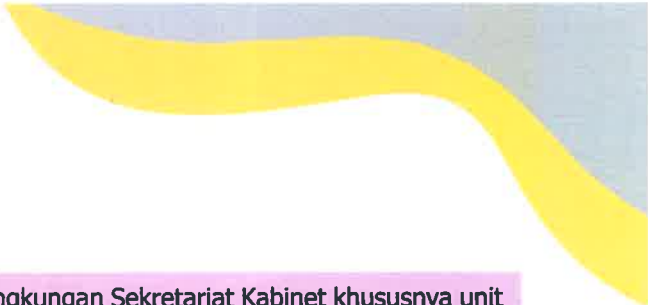


Berbagai upaya perbaikan kinerja telah dilakukan, mulai dari perbaikan dalam perencanaan kinerja dengan melakukan reviu terhadap IKU, meningkatkan target kinerja setiap tahunnya, terus menyempurnakan sistem teknologi informasi yang berkaitan dengan proses bisnis Biro AKRB antara lain dengan mengembangkan Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) Versi 2, Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT), aplikasi E-kinerja, mengoordinasikan penyusunan Rencana Aksi RB, pelaksanaan manajemen risiko, dan terus mendorong seluruh pihak untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan RB.

Pada tahun 2023 Biro AKRB berupaya meningkatkan kinerja dengan menggerakkan seluruh unit kerja untuk menyukseskan pelaksanaan SAKIP dan RB Sekretariat Kabinet. Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan diantaranya: penyusunan rencana aksi RB, *risk register* manajemen risiko seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, penyusunan rencana penanganan risiko, bimbingan teknis penyusunan SKP, dan penyusunan kajian pengembangan sistem manajemen kinerja. Selain itu Biro AKRB mengoordinasikan survei atas kepuasan layanan dan pemanfaatan dokumen di lingkungan Kedeputan Bidang Administrasi.

Seluruh kegiatan Biro AKRB tahun 2023 berhasil terlaksana dengan baik. Adapun realisasi anggaran Biro AKRB yang digunakan untuk pencapaian sasaran Biro AKRB sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.716.661.698,00 atau **92,94%** dari pagu setelah revisi terakhir Rp. 771.132.000,00.

Berdasarkan hasil capaian dari keseluruhan indikator kinerja Biro AKRB, saran masukan *stakeholders*, serta saran penyempurnaan yang diperoleh atas hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP dan RB yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) pada tahun 2023, Biro AKRB berkomitmen untuk terus melakukan upaya penyempurnaan guna peningkatan kinerja:

- 
- 1 Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet khususnya unit Fasilitasi Operasional agar mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan terkait akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi
 - 2 Mengoptimalkan dan penyempurnaan aplikasi sistem kinerja organisasi (SIKT2)
 - 3 Mengoptimalkan koordinasi dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring akuntabilitas kinerja
 - 4 Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM di Biro AKRB dengan mengikutsertakan pejabat dan pegawai dalam program pendidikan dan pelatihan yang menunjang kemampuan teknis serta *soft skill* guna menyelesaikan pekerjaan
 - 5 Penyempurnaan penjenjangan kinerja dan implementasi hasilnya pada dokumen perencanaan kinerja
 - 6 Meningkatkan layanan ketatausahaan dan persuratan yaitu dengan melayani di luar jam kerja



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

**1.2. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN
UTAMA**

1.3. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

1.5. SISTEMATIKA LAPORAN



BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dalam penyelenggaraannya, SAKIP meliputi rencana strategis, indikator kinerja utama, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta review dan evaluasi kinerja. SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendesain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan.

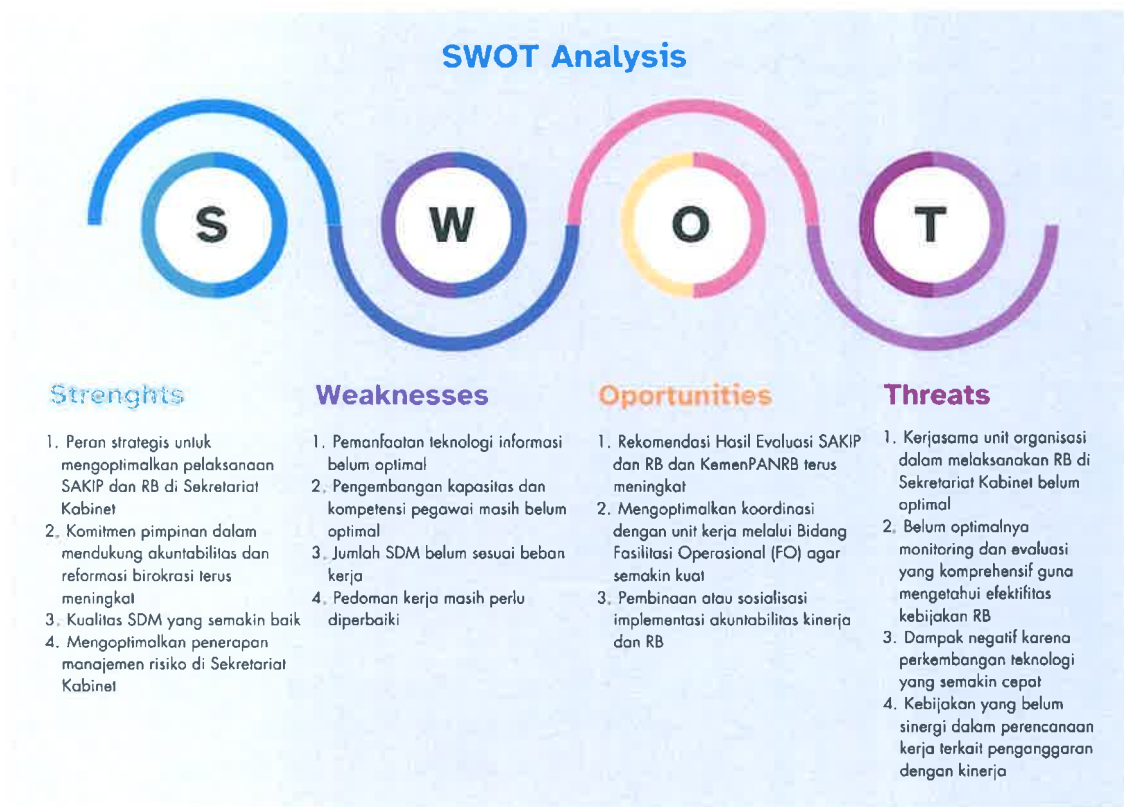
Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu instrumen dari komponen SAKIP yang berguna untuk melaporkan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas yakni satuan kerja, unit organisasi dan Kementerian/Lembaga (KL) untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian kinerja dalam bentuk LKj.

Biro AKRB sebagai entitas akuntabilitas kinerja unit kerja Eselon II berkewajiban menyusun LKj sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan, yang disampaikan kepada Deputy Bidang Administrasi selaku pimpinan Unit Organisasi. LKj Biro AKRB Tahun 2023 dapat digunakan sebagai bahan penunjang evaluasi akuntabilitas kinerja, acuan penyempurnaan perencanaan kinerja, dan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang, sehingga kinerja Biro AKRB secara keseluruhan dapat menuju ke arah perbaikan yang berkesinambungan.

b. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Aspek strategis dan permasalahan yang dihadapi Biro AKRB akan dianalisis melalui kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) (*SWOT*) Biro AKRB. Berikut ini gambaran SWOT Biro AKRB.

Gambar 1.1 Analisis *SWOT* Biro AKRB



Melalui analisis kondisi internal Biro AKRB diperoleh aspek kekuatan dan kelemahan organisasi. Kekuatan Biro AKRB antara lain:

1. Peran strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan SAKIP dan RB di Sekretariat Kabinet

Biro AKRB memiliki peran strategis dalam mewujudkan *good governance*. Biro AKRB berperan menjadi motor penggerak dalam mengawal pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet dengan melakukan pengoordinasian semua bentuk aksi penguatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Dengan demikian, Biro AKRB merupakan satu unit kerja yang mempunyai peran strategis dalam penguatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.

Biro AKRB juga turut menyokong Deputy Bidang Administrasi dalam mengoordinasikan implementasi SAKIP dan RB di lingkungan Sekretariat Kabinet, sehingga dapat mewujudkan Sekretariat Kabinet yang akuntabel, beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, mendorong terwujudnya transparansi Sekretariat Kabinet, yang kemudian akan berdampak pada terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

2. Komitmen pimpinan dalam mendukung akuntabilitas dan reformasi birokrasi terus meningkat

Komitmen pimpinan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan faktor terpenting dalam implementasi SAKIP dan RB. Hal ini tercermin dalam keterlibatan pimpinan secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Pimpinan mengawal penyusunan dan penerapan *Work Plan* RB dan *Quick Wins* yang menggerakkan organisasi guna memperbaiki sistem dan mekanisme kerja serta produk utama (*core business*) Sekretariat Kabinet, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara cepat oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) Sekretariat Kabinet, serta berpartisipasi aktif dalam evaluasi SAKIP dan RB oleh KemenPANRB, dan mengoordinasikan segala upaya tindak lanjut rekomendasi KemenPANRB atas hasil evaluasi SAKIP dan RB.

3. Kualitas SDM yang semakin baik

Saat ini, Biro AKRB didukung dengan kekuatan SDM dengan status ASN sebanyak 32 orang, terdiri dari pejabat struktural sebanyak 20 orang dan pelaksana 12 orang. Selain ASN terdapat SDM dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 12 orang.

SDM yang dimiliki saat ini sudah cukup memadai karena didukung oleh pendidikan formal dan informal yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Pejabat dan Pegawai pada Biro AKRB didorong untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial secara mandiri dengan mengikuti berbagai *webinar*. Salah satu penyedia program *webinar* yang mengulas berbagai topik terkait penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan adalah SmartID dengan programnya *Smart Discussion Series* (SDS). Selain itu, seandainya terdapat kegiatan sosialisasi atas peraturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro AKRB secara daring, sering kali diinfokan pada grup *chat* Biro AKRB, sehingga seluruh pejabat/pegawai di Biro AKRB dapat bersama-sama memahami peraturan baru tersebut.

4. Mengoptimalkan penerapan manajemen risiko di Sekretariat Kabinet

Salah satu fungsi Biro AKRB adalah mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Kabinet. Sekretariat Kabinet telah menerapkan manajemen risiko dengan disusunnya Daftar Risiko (*Risk Register*), Peta Risiko, dan Rencana Penanganan Risiko yang dihadapi dan perlu dilakukan oleh seluruh unit kerja Eselon II. Sekretariat Kabinet melakukan *monitoring* dan evaluasi secara mandiri di akhir tahun guna mendapatkan *feedback* untuk penyusunan dokumen manajemen risiko selanjutnya. Dengan adanya kesadaran dalam mengidentifikasi risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan, diharapkan setiap unit kerja akan dapat mengembangkan strategi untuk mengelola risiko atau melakukan mitigasi risiko melalui pemberdayaan sumber daya yang dimiliki sesuai pernyataan komitmen setiap pimpinan unit kerja (Eselon II) untuk menerapkan manajemen risiko. Sekretariat Kabinet juga menjadi bagian dari pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi eksternal atas pelaksanaan maturitas SPIP yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kelemahan yang dimiliki organisasi akan menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja jika tidak dipersiapkan strategi untuk mengatasinya. Beberapa hal yang diidentifikasi menjadi kelemahan Biro AKRB, antara lain:

1. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal

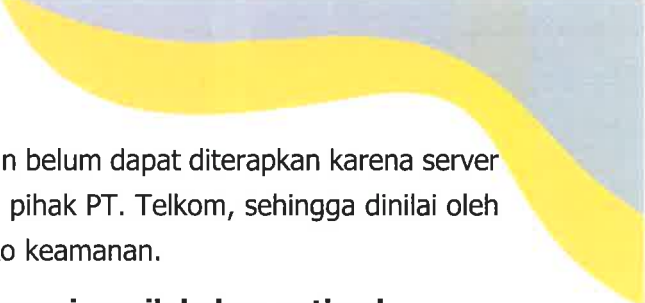
Biro AKRB merupakan admin dari 3 (tiga) buah aplikasi yang digunakan oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet, antara lain aplikasi *e-kinerja* Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT), dan SIPT (Sistem Informasi Persuratan Terpadu).

Aplikasi *e-kinerja* merupakan aplikasi berbagi pakai yang dibangun oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Aplikasi *e-kinerja* merupakan media penyusunan dan penilaian SKP berdasarkan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022. Di akhir tahun 2022 BKN meluncurkan aplikasi ini menggantikan aplikasi *Toolkits* yang sebelumnya digunakan pada tahun 2022.

Pada bulan Maret tahun 2023, Biro AKRB telah mengoordinasikan instalasi aplikasi tersebut kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet melalui kegiatan Bimbingan Teknis dengan mengundang narasumber dari BKN. Sekretariat Kabinet telah menggunakan aplikasi *e-kinerja* di tahun 2023 untuk penyusunan penetapan SKP. Aplikasi *e-kinerja* ini merupakan aplikasi baru, sehingga Biro AKRB berusaha melakukan pendampingan secara intensif kepada unit kerja di seluruh kedeputian.

Aplikasi SIKT merupakan media *monitoring* capaian kinerja dan realisasi anggaran, serta penyusunan PK. Fungsi *monitoring* akan berjalan baik jika seluruh pejabat dan pegawai telah memanfaatkan sistem yang seharusnya dapat diakses oleh masing-masing individu. Selama ini dalam pengisian aplikasi masih banyak yang bergantung kepada unit Fasilitas Operasional. Biro AKRB telah berupaya meningkatkan pemanfaatan dengan mengoordinasikan rencana pengembangan kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin). Pada tahun 2022 telah berhasil ditambahkan fitur dialog kinerja dan integrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk memonitor penyerapan anggaran. Pada tahun 2023 Biro AKRB berencana mengembangkan kembali SIKT, sehingga dapat mengakomodir proses pelaksanaan SAKIP yang lebih mumpuni. Hal ini didukung pula dengan adanya *Area of Improvement* (AoI) pada Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar Sekretariat Kabinet dapat lebih mengoptimalkan penggunaan SIKT khususnya untuk keperluan monitoring dan evaluasi.

Aplikasi SIPT merupakan media persuratan internal Sekretariat Kabinet yang dibangun oleh PT. Telkom. SIPT bertujuan untuk mempermudah pelacakan surat, pendelegasian tugas/pemberian disposisi, dan mendukung program *go green* dengan penghematan penggunaan kertas (*paperless*). Apabila seluruh pejabat maupun pegawai memanfaatkannya maka akan memudahkan pelaksanaan kinerja karena proses administrasi serta persetujuan dapat berjalan dengan cepat. Salah satu yang masih harus diupayakan adalah penggunaan



digital signature atau tanda tangan elektronik, namun belum dapat diterapkan karena server dari aplikasi persuratan Sekretariat Kabinet masih di pihak PT. Telkom, sehingga dinilai oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terdapat risiko keamanan.

2. Pengembangan kapasitas dan kompetensi pegawai masih belum optimal

Pencapaian kinerja Biro AKRB perlu didukung SDM yang memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pengembangan kapasitas dan kompetensi pegawai belum berdasarkan *gap analysis* kompetensi yang menyeluruh, sehingga pengembangan kapasitas dan kompetensi antar pegawai belum proporsional.

3. Jumlah SDM belum sesuai beban kerja

Kebutuhan SDM berfluktuasi karena dalam perjalanan karir pegawai dimungkinkan pegawai dipromosikan atau dirotasi. Hal tersebut seringkali tidak diimbangi dengan penggantian pegawai pada posisi yang ditinggalkan, sehingga jumlah SDM menjadi lebih sedikit. Pengembangan kapasitas dalam rangka pengembangan kompetensi SDM yang proporsional dengan beban kerja perlu dilakukan agar dapat menciptakan pelaksanaan pekerjaan yang cepat, inovatif, kreatif dan adaptif yang dapat mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.

4. Pedoman kerja masih perlu diperbaiki

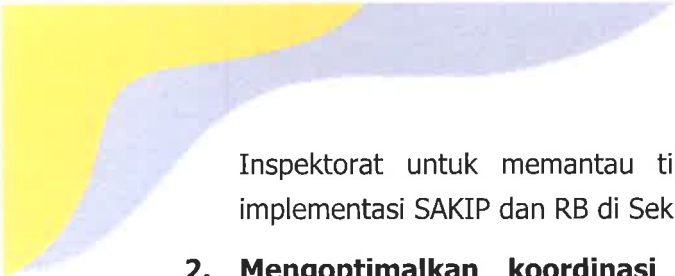
Perubahan SOTK seyogyanya diikuti dengan perubahan SOP disebabkan terdapat tugas dan fungsi yang berubah. Saat ini, Biro AKRB belum melakukan penyesuaian atas SOP atau pedoman kerja pada tahun 2022. Hal ini menjadi salah satu kelemahan yang perlu untuk segera ditindaklanjuti.

Pedoman evaluasi AKIP terbaru yaitu PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 mensyaratkan keberadaan pedoman teknis penyusunan perencanaan kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Biro AKRB telah menyusun Panduan Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet (P4KIN) sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021.

Selanjutnya analisis peluang dan ancaman yang timbul dari kondisi eksternal Biro AKRB. Peluang adalah faktor eksternal Biro AKRB yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan Biro. Peluang yang ada bisa dimanfaatkan untuk menambah kekuatan dari Biro AKRB. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki Biro AKRB:

1. Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP dan RB dan KemenPANRB terus meningkat

Evaluasi AKIP dan pelaksanaan RB dilakukan oleh KemenPANRB setiap tahun. Selain memberikan penilaian, evaluasi tersebut juga memberikan rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP dan RB di instansi serta menyokong tercapainya sasaran pelaksanaan RB nasional. Rekomendasi tersebut menciptakan peluang bagi Biro AKRB untuk berperan penting berkolaborasi dengan



Inspektorat untuk memantau tindak lanjutnya, serta memastikan proses perbaikan implementasi SAKIP dan RB di Sekretariat Kabinet berjalan dengan baik.

2. Mengoptimalkan koordinasi dengan unit kerja melalui Bidang Fasilitas Operasional (FO) agar semakin kuat

Bidang FO mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi. Biro AKRB terus berkoordinasi secara intensif dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan RB dengan bidang FO yang merupakan perantara Biro AKRB dan Kedeputan di lingkungan Sekretariat Kabinet. Semakin baik koordinasi dan kualitas bidang FO dalam memahami implementasi SAKIP dan RB, maka akan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan SAKIP dan RB di setiap Kedeputan.

3. Pembinaan atau sosialisasi implementasi akuntabilitas kinerja dan RB

Biro AKRB berupaya melakukan pembinaan atau sosialisasi implementasi akuntabilitas kinerja dan RB terhadap kedeputan serta unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet dengan cara melakukan asistensi pada saat penyusunan dokumen-dokumen SAKIP dan RB, dan atas peraturan baru disosialisasikan dengan mendatangkan narasumber yang mumpuni, sehingga baik Biro AKRB maupun unit kerja mendapatkan pemahaman yang baik.

Selain itu, Biro AKRB membentuk forum komunikasi via *whatsapp group*, sehingga proses diskusi berjalan lebih baik dan sebagai sarana *sharing knowledge*.

Ancaman adalah faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Biro AKRB mempertimbangkan hal ini untuk menempatkan rencana dalam menangani masalah yang terjadi.

1. Kerja sama unit organisasi dalam melaksanakan RB di Sekretariat Kabinet belum optimal

Implementasi RB yang meliputi 8 (delapan) area perubahan memerlukan dukungan dari seluruh pihak, mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan staf. Oleh karena itu, kolaborasi unit organisasi dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet sangat penting dalam upaya pelaksanaan perencanaan RB.

Perencanaan RB jangka menengah tertuang dalam *Road Map* RB Sekretariat Kabinet 2020—2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 3 Tahun 2020, sedangkan Rencana Kerja (*Work Plan*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet ditetapkan setiap tahun dengan Perseskab.

Apabila dukungan serta kerja sama seluruh pihak di lingkungan Sekretariat Kabinet tidak optimal, maka menjadi ancaman terhadap berjalannya proses implementasi RB di lingkungan

Setkab, terwujudnya birokrasi berkelas dunia (*world class bureaucracy*) khususnya di lingkup lingkungan Sekretariat Kabinet, yang ditandai dengan semakin meningkatnya pelayanan publik dan tata kelola yang efektif dan efisien akan menghadapi hambatan.

2. Belum optimalnya *monitoring* dan evaluasi yang komprehensif guna mengetahui efektifitas kebijakan RB

Pelaksanaan RB di Sekretariat Kabinet telah melalui proses yang cukup panjang. Berdasarkan hasil monev KemenPANRB, pelaksanaan RB pada Sekretariat Kabinet terus mengalami peningkatan indeks. Peningkatan indeks ini berarti terdapat peningkatan pengelolaan dalam 8 (delapan) area perubahan RB dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Namun demikian, walaupun pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet sudah sesuai dengan kebijakan yang ada dan dibuktikan dengan peningkatan perolehan nilai (indeks) setiap tahunnya, kiranya pelaksanaan tersebut masih perlu di *monitoring* dan evaluasi lebih komprehensif lagi guna mengetahui efektifitas kebijakan RB yang diterapkan di Sekretariat Kabinet, yakni adanya perubahan yang konkrit, tidak hanya tersedia *evidence based*.

3. Dampak negatif karena perkembangan teknologi yang semakin cepat

Inovasi teknologi yang berkembang begitu pesat telah mengakibatkan banyak kebijakan menjadi cepat usang, belum lagi kesenjangan antara penguasaan dan pemanfaatan teknologi. Hal ini akan menjadi ancaman bagi Biro AKRB, jika tidak dapat mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi. Untuk dapat meningkatkan kualitas kinerja Biro AKRB dan memberikan kontribusi positif kepada Sekretariat Kabinet, Biro AKRB selalu berupaya memperbaiki kelemahan dan mengambil peluang yang tersedia, serta mengambil langkah antisipasi untuk mengatasi ancaman tersebut.

4. Kebijakan yang belum sinergi dalam perencanaan kerja terkait penganggaran dengan kinerja

Regulasi terkait penyusunan anggaran yang selalu berubah menuntut unit kerja harus mampu menyesuaikan perubahan agar *output* dan *outcome*-nya jelas.

Salah satu kendala adalah ketika unit kerja sudah merencanakan kegiatan untuk tahun berikutnya, namun menerima pagu lebih kecil dari usulan atau adanya optimalisasi anggaran, maka unit kerja harus menyesuaikan lagi kegiatan dengan pagu yang ada. Selain itu, unit kerja dituntut untuk tetap melakukan efisiensi dengan pagu tersebut, namun tetap menjaga kinerja yang baik.

c. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kedudukan, tugas, dan fungsi Biro AKRB, berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagai berikut:

1. Kedudukan

Biro AKRB berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet.

2. Tugas

Biro AKRB memiliki tugas membantu Deputy Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet dalam rangka pelaksanaan koordinasi pengelolaan kinerja organisasi dan individu, pengelolaan reformasi birokrasi, pengendalian persuratan, dan ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro AKRB menyelenggarakan fungsi:

- a) pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis pada tingkat satuan organisasi dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b) penyelenggaraan perencanaan kinerja organisasi di lingkungan Deputy Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet;
- c) penyelenggaraan pemantauan, pengukuran, dan pelaporan kinerja organisasi dan individu;
- d) pengembangan sistem manajemen kinerja;
- e) penyelenggaraan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet;
- f) pengoordinasian pelaksanaan penyusunan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- g) pelaksanaan manajemen perubahan di lingkungan Deputy Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet;
- h) pengkajian dan pengembangan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet;
- i) penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi ketatausahaan pimpinan dan perbantuan, serta pengendalian persuratan;
- j) penomoran Peraturan Sekretaris Kabinet, Keputusan Sekretaris Kabinet, serta peraturan dan keputusan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Administrasi.

Struktur Organisasi

Biro AKRB terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Bagian Akuntabilitas Kinerja

Bagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis pada tingkat satuan organisasi dan unit kerja, serta pengelolaan kinerja organisasi dan individu di lingkungan Sekretariat Kabinet.

2. Bagian Reformasi Birokrasi

Bagian Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan perencanaan, penyusunan, dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

3. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan dan dukungan administrasi ketatausahaan pimpinan dan perbantuan, pengendalian persuratan, dan penomoran Peraturan Sekretaris Kabinet, Keputusan Sekretaris Kabinet, peraturan dan keputusan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Struktur organisasi Biro AKRB dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Biro AKRB



d. Sistematika Laporan

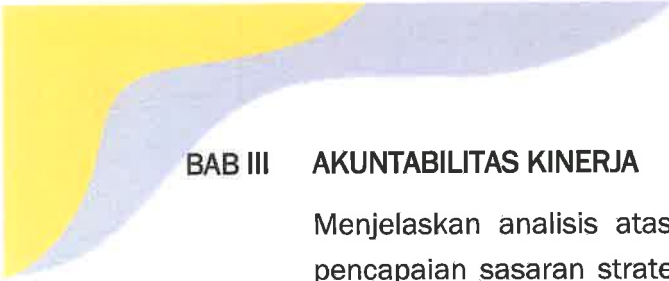
Berdasarkan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Biro AKRB Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan LKj Tahun 2022, aspek strategis dan permasalahan utama yang dihadapi, SDM, serta gambaran tugas dan fungsi Biro AKRB, struktur organisasi dan sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan gambaran rencana strategis Biro AKRB dan ikhtisar Perjanjian Kinerja Biro AKRB Tahun 2022.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan analisis atas capaian kinerja Biro AKRB yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran strategis organisasi, yang ditunjang dengan pengungkapan dan penyajian hasil pengukuran kinerja, serta akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKj Biro AKRB Tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

2.3. PERJANJIAN KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Arah kebijakan Sekretariat Kabinet sebagaimana tergambar dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, yaitu “Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Sedangkan arah kebijakan Deputy Bidang Administrasi, yaitu “Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet”. Mengacu pada arah kebijakan Sekretariat Kabinet dan Deputy Bidang Administrasi tersebut, arah kebijakan Biro AKRB adalah:

Peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2020–2024 berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 29 April 2021, disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan diarahkan untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden, 7 (tujuh) Agenda Pembangunan sesuai misi Nawacita Kedua Presiden dan Wakil Presiden.

Berikut gambaran pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro AKRB berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020–2024.

Gambar 2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

VISI	Biro AKRB yang berwibawa dan andal dalam memberikan dukungan manajemen di lingkungan Sekretariat Kabinet
MISI	Meningkatkan kualitas dukungan teknis, pelayanan, dan administrasi di bidang kinerja organisasi dan individu, reformasi birokrasi, serta pengendalian persuratan dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Kabinet
TUJUAN	Peningkatan kualitas SAKIP dan RB serta pengendalian persuratan dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Kabinet
SASARAN STRATEGIS	1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet. 2. Terselenggaranya layanan persuratan serta ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

2.2. Indikator Kinerja Utama

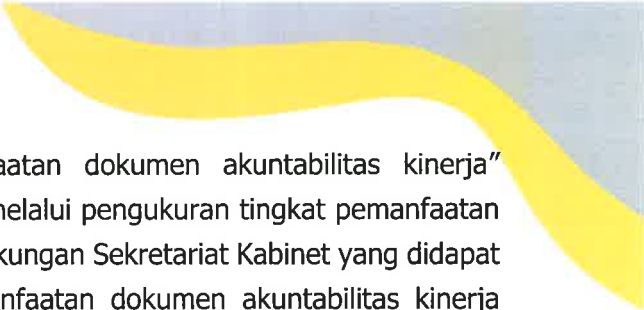
Indikator Kinerja Utama (IKU) berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif dan strategis menjadi definitif, terukur dan realistis. IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet, Biro AKRB memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 5 (lima) IKU.

Pada tahun 2022, Biro AKRB telah melakukan reviu terhadap IKU Biro sebagai upaya memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik guna memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang lebih baik, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta mempertimbangkan hasil evaluasi KemenPANRB. Salah satu IKU perlu dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan tantangan terkini, yakni "Jumlah unit ke deputian yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori BB. Hal ini disebabkan oleh hasil penilaian atas AKIP Ke deputian di tahun 2021 dan 2022 mayoritas sudah mencapai A, sehingga usulan perubahannya menjadi "Jumlah unit ke deputian yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori A". Perbaikan terhadap rumusan sasaran dan indikator kinerja tersebut memperlihatkan komitmen Biro AKRB untuk meningkatkan pelayanannya terhadap *stakeholders* serta komitmen terhadap pelaksanaan program RB guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tabel 2.1 menunjukkan sasaran strategis dan IKU Biro AKRB sebelum perubahan.

Tabel 2.1 IKU Biro AKRB

SASARAN STRATEGIS	IKU
1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	1. Jumlah unit ke deputian yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori BB
	2. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja
	3. Jumlah komponen penilaian reformasi birokrasi yang nilainya meningkat
	4. Persentase tingkat pemanfaatan dokumen reformasi birokrasi
2. Terselenggaranya layanan persuratan serta ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan

Sasaran strategis Biro AKRB menopang sasaran Deputy Bidang Administrasi "Terwujudnya kelancaran tugas, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat Kabinet" yang memiliki indikator Hasil Penilaian AKIP dan Indeks RB Sekretariat Kabinet. *Cascading* kinerja dari Eselon I kepada Biro AKRB dicapai melalui pengawalan pelaksanaan SAKIP dan RB di seluruh unit kerja. Guna menopang pencapaian Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Kabinet, Biro AKRB menetapkan indikator kinerja: Jumlah unit ke deputian yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori "A". Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan SAKIP Sekretariat Kabinet berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet yang realisasinya dihitung dengan jumlah unit ke deputian yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP minimal kategori "A".



Indikator kedua “Persentase tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja” digunakan untuk mengukur kualitas kinerja Biro AKRB melalui pengukuran tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja oleh unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang didapat dari hasil survei kepuasan. Semakin meningkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja mengindikasikan implementasi SAKIP yang semakin baik di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pencapaian hasil evaluasi RB dan hasil PMPRB ditopang dengan indikator “Jumlah komponen penilaian reformasi birokrasi yang nilainya meningkat”. Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja Biro AKRB dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet melalui peningkatan Indeks RB Sekretariat Kabinet atas hasil penilaian KemenPANRB. Capaiannya dihitung dengan jumlah komponen penilaian indeks RB yang meningkat dari tahun sebelumnya. Indikator “Persentase tingkat pemanfaatan dokumen RB” digunakan untuk mengukur kualitas kinerja Biro AKRB melalui pengukuran tingkat pemanfaatan dokumen RB oleh unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang didapatkan dari hasil survei kepuasan. Semakin meningkat pemanfaatan dokumen RB mengindikasikan implementasi RB yang semakin baik di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pencapaian sasaran kedua diukur dengan 1 (satu) buah indikator “Persentase kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan”, IKU digunakan untuk mengukur efektivitas dan kualitas layanan pengendalian persuratan dan ketatausahaan pimpinan melalui pengukuran tingkat kepuasan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan yang dihitung melalui hasil survei kepuasan.

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja (PK) adalah dokumen yang berisikan penugasan dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur, tertentu, berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Biro AKRB telah menyusun PK dengan menggunakan aplikasi SIKT2.intranet sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan kinerja yang diperjanjikan kepada pimpinan dan *stakeholders* pada tahun 2023 dengan indikator kinerja dan target sebagaimana dapat terlihat pada tabel berikut.

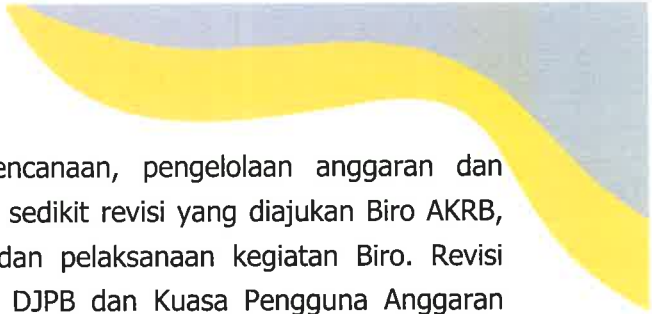
Tabel 2.2 PK Biro AKRB Tahun 2023

No.	Sasaran Program/Kegiatan	PK 2023	
		Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Jumlah unit kedeputian yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori A	5 Unit Kerja
		Persentase tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja	82%
		Jumlah komponen penilaian reformasi birokrasi yang nilainya meningkat	6 Komponen
		Persentase tingkat pemanfaatan dokumen reformasi birokrasi	82%
2	Terselenggaranya layanan persuratan serta ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan	82%
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan SAKIP dan RB Kedeputian Bidang Administrasi	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh Unit Kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Administrasi	80%
		Persentase pemenuhan data dukung pelaksanaan reformasi birokrasi Deputi Bidang Administrasi	80%
4	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	90%

PK Biro AKRB selain memuat IKU terdapat 2 sasaran strategis tambahan, yaitu 1) Meningkatnya kualitas pelaksanaan SAKIP dan RB Kedeputian Bidang Administrasi; dan 2) Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang efektif.

Sasaran ketiga diukur dengan 2 (dua) buah indikator kinerja. Indikator kinerja "Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh Unit Kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Administrasi" bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SAKIP Deputi Bidang Administrasi dengan mengoordinasikan upaya tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan Inspektorat. Sedangkan indikator "Persentase pemenuhan data dukung pelaksanaan reformasi birokrasi Deputi Bidang Administrasi" bertujuan untuk memastikan pemenuhan data dukung LKE PMPRB Deputi Bidang Administrasi untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi PMPRB. Pemenuhan data dukung LKE PMPRB Deputi Bidang Administrasi memperlihatkan peran Biro AKRB dalam mengawal pelaksanaan RB di lingkungan Kedeputian Bidang Administrasi.

Pencapaian sasaran keempat diukur dengan 2 (dua) buah indikator kinerja. Indikator kinerja pertama "Indeks revisi program dan anggaran Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi



Birokrasi” digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Biro AKRB yang efektif. Semakin sedikit revisi yang diajukan Biro AKRB, maka semakin baik kualitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Biro. Revisi dimaksud merupakan revisi kewenangan DJA, Kanwil DJPB dan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Kabinet. Namun, tidak termasuk dengan revisi yang disebabkan APBNP.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu komponen penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Indikator kinerja kedua “Persentase penyerapan anggaran pada Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi” bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Biro AKRB sesuai dengan perencanaan dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dan mendukung tercapainya target IKPA Sekretariat Kabinet yang dinilai oleh Kementerian Keuangan.

Program kerja Biro AKRB termasuk di dalam alokasi anggaran pada program generik “Dukungan Manajemen” yang pelaksanaannya melalui kegiatan dukungan manajemen kinerja organisasi dan individu, reformasi birokrasi, serta pengendalian persuratan dan ketatausahaan pimpinan. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran yang diambil dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), pada tahun 2023 Biro AKRB disokong dengan pagu awal sebesar Rp.7.145.000.000,00 dan setelah dioptimalisasi menjadi sebesar Rp. 2.644.908.000,00. Pagu anggaran Biro AKRB, di dalamnya termasuk pagu anggaran dukungan penyelenggaraan acara dan kegiatan Sekretaris Kabinet, Wakil Sekretaris Kabinet dan Deputi Bidang Administrasi, serta anggaran Staf Khusus Sekretaris Kabinet dan Staf Ahli Sekretaris Kabinet. Dari total anggaran sebesar Rp.2.644.908,00 yang digunakan untuk pencapaian sasaran Biro AKRB adalah sebesar Rp. 771.132.000,00.

Rincian kegiatan Biro AKRB meliputi: perencanaan kinerja organisasi; pemantauan, pengukuran, dan pelaporan kinerja organisasi dan individu; pengembangan sistem manajemen kinerja; perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi; pelaksanaan manajemen perubahan; pengkajian dan pengembangan reformasi birokrasi; dukungan pelayanan kunjungan kerja dan rapat/pertemuan pimpinan; dan dukungan pelayanan dan administrasi ketatausahaan dan persuratan.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

3.1.1. CAPAIAN KINERJA JANGKA MENENGAH

3.1.2. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

3.2. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

3.2.1 REALISASI ANGGARAN

3.2.2. SUMBER DAYA MANUSIA

3.2.3. SARANA PRASARANA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Optimalisasi pemberian dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang prima di bidang kinerja organisasi dan individu, reformasi birokrasi, pengendalian persuratan, dan ketatausahaan dibangun melalui komitmen terhadap pemenuhan target kinerja yang diperjanjikan di awal tahun serta upaya menindaklanjuti rekomendasi baik dari hasil evaluasi pihak internal maupun eksternal.

Biro AKRB merupakan satu unit organisasi yang mempunyai peran strategis dalam penguatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Biro AKRB berperan menjadi motor penggerak dan mengawal pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet dengan melakukan pengoordinasian semua bentuk aksi penguatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Kinerja Biro AKRB dilaksanakan melalui 1 (satu) program, yaitu **"Dukungan Manajemen"** dan 1 (satu) kegiatan, yaitu **"Pengelolaan Kinerja Organisasi, Reformasi Birokrasi, dan Ketatausahaan"**. Pelayanan Biro AKRB terdiri dari proses pengelolaan manajemen kinerja organisasi dan individu, pengelolaan reformasi birokrasi dan pengendalian persuratan dan ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet, seluruhnya dikoordinasikan oleh Biro AKRB. LKj Biro AKRB disusun sebagai komitmen dan upaya Biro untuk selalu mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Sekretariat Kabinet sebagai organisasi pemerintah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Sekretariat Kabinet memiliki unit kerja Bagian Fasilitas Operasional (FO) di 5 kedeputian substansi yang menjalankan tugas dan fungsi pengoordinasian pelaksanaan RB dan SAKIP. FO menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- c. pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi;
- d. pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Deputi.

FO berperan penting dalam mendukung kinerja Biro AKRB karena FO merupakan perpanjangan tangan Biro AKRB dalam melaksanakan seluruh rencana aksi Biro AKRB guna mewujudkan tata kelola pemerintahan Sekretariat Kabinet yang baik.

Proses penyusunan PK, pengukuran dan pemantauan capaian kinerja secara triwulanan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) yang dapat diakses melalui URL SIKT2.intranet. Penyusunan PK dilaksanakan sampai dengan level eselon IV, supaya seluruh pegawai ikut berperan dalam pencapaian target kinerja organisasi, penentuan sasaran dan

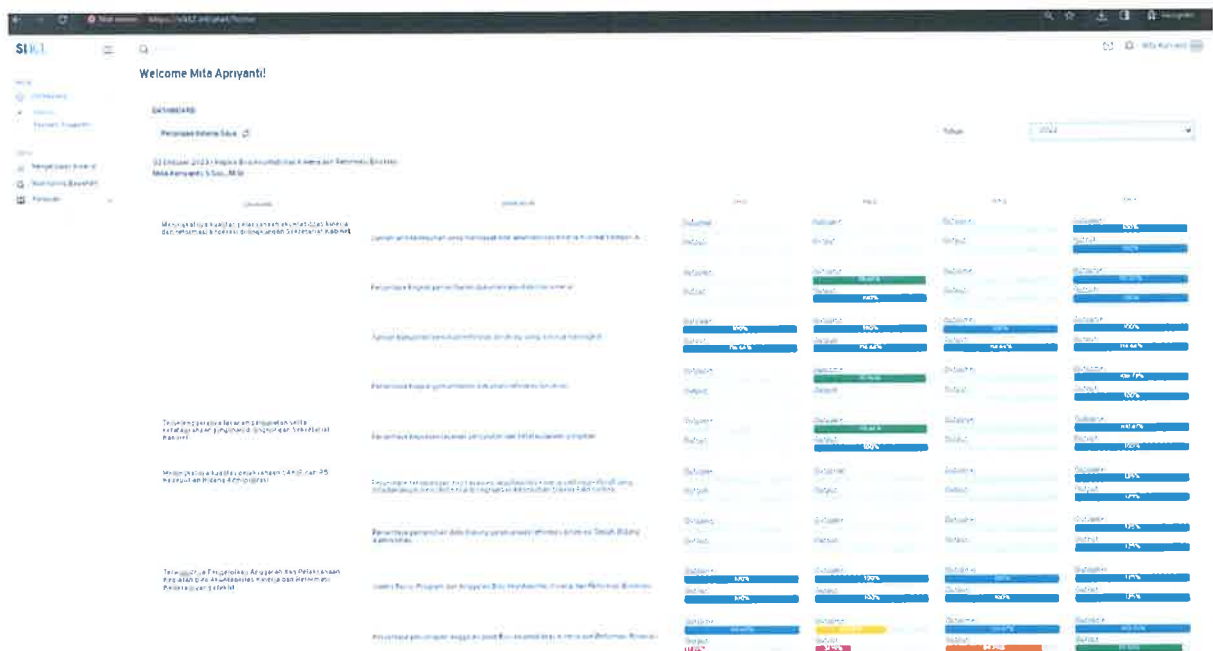
indikator kinerja pegawai dilaksanakan dengan penjenjangan kinerja yang baik dan didorong menggunakan indikator kinerja *outcome*.

Gambar 3.1 Tampilan SIKT2



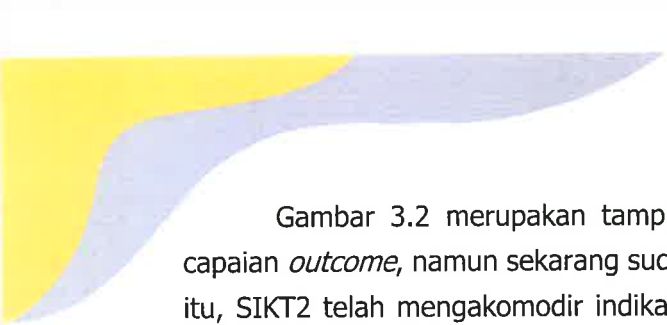
PK dicetak dengan menu Perjanjian Kinerja dan fitur *sync* anggaran yang digunakan untuk meng-*update* data anggaran. Setiap triwulannya PIC Manajemen Kinerja membantu memastikan realisasi *output*, *outcome*, serta data dukung telah diunggah di SIKT2. Biro AKRB melakukan verifikasi dan mengoordinasikan capaian level K/L. Berikut ini gambar *dashboard* pemantauan kinerja Biro AKRB dari aplikasi SIKT2.

Gambar 3.2 Tampilan *Dashboard* Capaian Kinerja Biro AKRB



Di tahun 2022, Biro AKRB berkolaborasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) untuk membangun aplikasi SIKT. Pengembangan yang dilakukan diantaranya:

1. Tampilan *dashboard* pada aplikasi SIKT2 dengan menggunakan indikator warna;
2. Menambahkan fitur Dialog Kinerja antara atasan dengan bawahan;
3. SIKT terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).



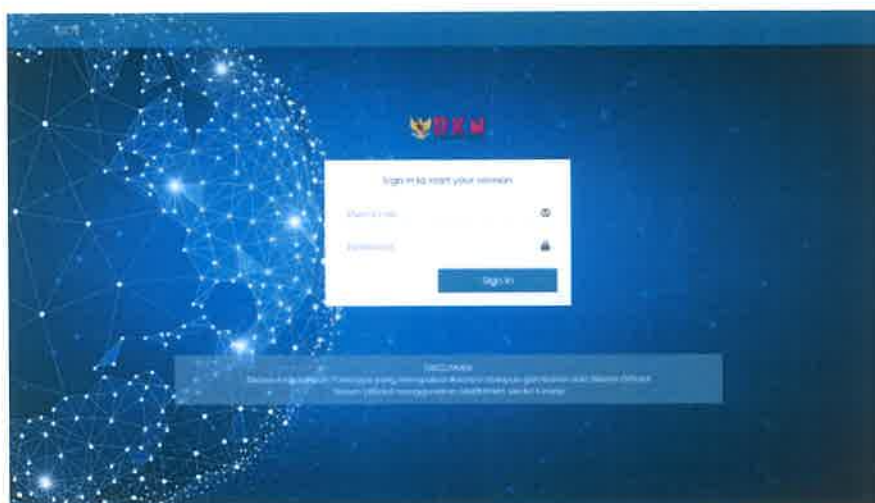
Gambar 3.2 merupakan tampilan baru *dashboard* SIKT2. Sebelumnya hanya terlihat capaian *outcome*, namun sekarang sudah bisa menampilkan capaian *output* dan *outcome*. Selain itu, SIKT2 telah mengakomodir indikator warna pencapaian kinerja pada *dashboard*, sehingga memudahkan aktivitas monitoring bila terdapat pencapaian yang belum biru atau hijau yang menandakan pencapaian target belum maksimal.

Pada tahun 2023 Biro AKRB kembali berkolaborasi dengan Pusdatin untuk membangun aplikasi SIKT karena fitur-fitur yang tersedia saat ini hanya untuk mengakomodir penyusunan perjanjian kinerja dan pelaporan data kinerja triwulanan, dimana pada prosesnya belum memenuhi seluruh kebutuhan pelaksanaan SAKIP seperti yang diamanatkan oleh Presiden. Oleh karena itu, kami berencana mengembangkan kembali SIKT, sehingga dapat mengakomodir proses pelaksanaan SAKIP yang lebih mumpuni, hal ini didukung pula dengan adanya *area of improvement* pada Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Sekretariat Kabinet agar dapat lebih mengoptimalkan penggunaan SIKT khususnya untuk keperluan monitoring dan evaluasi. Selain itu juga untuk pengelolaan kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, sehingga prosesnya dapat lebih mudah, transparan dan akuntabel.

Fitur-fitur yang rencananya akan dikembangkan pada aplikasi SIKT yang baru diantaranya: (1) *Dashboard* Jangka Menengah; (2) Diagram Informasi Kinerja (Pohon Kinerja); (3) Inventaris Dokumen Akuntabilitas Kinerja; (4) Rencana Aksi Perjanjian Kinerja; (5) *Dashboard* Rekap Unit Kerja terkait Pengisian SIKT; (6) Manual Indikator; dan sebagainya. Namun, hingga akhir tahun 2023 pembangunan aplikasi SIKT tersebut masih dalam proses oleh vendor dan diperkirakan baru dapat diimplementasikan pada tahun 2024. Kegiatan pembangunan aplikasi SIKT tersebut telah dianggarkan sebelumnya oleh Pusdatin.

Kementerian PANRB pada bulan Februari tahun 2022 menerbitkan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara menggantikan peraturan sebelumnya, yakni PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil, sehingga pada tahun 2022 Biro AKRB harus dengan cepat menyesuaikan implementasi penyusunan dan penilaian kinerja ASN berdasarkan peraturan yang terbaru. Pada tahun 2021, pengelolaan kinerja ASN telah menggunakan *toolkits* yang dibangun Badan Kepegawaian Negara (BKN), namun aplikasi ini masih berupa prototipe dari Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (SIMPEGNAS) Modul Kinerja yang dapat diakses melalui URL SKPOnline2.intranet. Dengan terbitnya PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 pihak BKN segera meng-*update toolkits* untuk bisa mengakomodir penetapan dan penilaian SKP dengan format dan aturan terbaru. Berikut ini adalah tampilan halaman *login* SKPOnline2.

Gambar 3.3 Gambar SKPOnline2



Pada triwulan 4 tahun 2022, BKN merilis aplikasi berbagi pakai e-Kinerja, Biro AKRB segera menindaklanjuti berkoordinasi dengan BKN untuk menggunakan aplikasi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya program Satu Data ASN yang merupakan wujud transformasi manajemen SDM ASN menuju sistem digital. Aplikasi ini dapat diakses melalui *link* <https://kinerja.bkn.go.id>. Pada akhir tahun 2022, Biro AKRB mempersiapkan *data base* unit organisasi terlebih dahulu sehingga Sekretariat Kabinet resmi menggunakan aplikasi e-Kinerja pada tahun 2023.

Gambar 3.4 Gambar aplikasi e-Kinerja



Biro AKRB pada bulan Maret 2023 telah mengadakan Bimbingan Teknis Aplikasi e-Kinerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendiseminasikan dan mengimplementasikan aplikasi e-Kinerja BKN di lingkungan Sekretariat Kabinet. Terkait hal tersebut, Biro AKRB mengundang narasumber dari BKN untuk memberikan pendalaman lebih jauh terkait aplikasi e-Kinerja yang nantinya data dari e-Kinerja akan diolah sebagai *database* penilaian kinerja untuk kebutuhan layanan kepegawaian serta membangun manajemen talenta. Berikut ini tampilan halaman *login* e-Kinerja.

3.1. Capaian Kinerja

3.1.1. Capaian Kinerja Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi berdasarkan potensi dan permasalahan yang telah diuraikan pada Bab I, tujuan strategis yang ingin dicapai Biro AKRB selama 5 (lima) tahun ke depan, adalah **"Peningkatan kualitas SAKIP dan RB serta pengendalian persuratan dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Kabinet"** yang diukur dengan 3 indikator kinerja beserta target pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Renstra Biro AKRB Tahun 2020—2024, yaitu:

- 1) Hasil PMPRB di Sekretariat Kabinet dengan target 86;
- 2) Hasil Penilaian RB Sekretariat Kabinet oleh Kementerian PANRB dengan target A (81,30);
- 3) Hasil Penilaian AKIP Sekretariat Kabinet oleh Kementerian PANRB BB (73,50).

Capaian kinerja jangka menengah Biro AKRB diukur dengan membandingkan pencapaian di tahun 2023 dengan target jangka menengah (tahun 2024), berikut ini realisasi dan capaian atas kinerja jangka menengah Biro AKRB.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Jangka Menengah Biro AKRB

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Hasil PMPRB di Sekretariat Kabinet	86,50	88,83	102,69%
Hasil Penilaian RB Sekretariat Kabinet oleh Kementerian PANRB	83,36	84,83	101,76%
Hasil Penilaian AKIP Sekretariat Kabinet oleh Kementerian PANRB	77,50	81,17	104,74%

Dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja jangka menengah Biro AKRB adalah **103,06%** dengan predikat Memuaskan. Hal tersebut memperlihatkan kinerja Biro AKRB yang optimal dalam mendorong implementasi SAKIP dan RB yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet. Hal tersebut juga mendorong Biro AKRB untuk meningkatkan target pencapaian lebih tinggi. Ke depan Biro AKRB akan terus mengupayakan peningkatan perolehan nilai dan terus mendorong kualitas implementasi SAKIP dan RB yang lebih baik lagi.

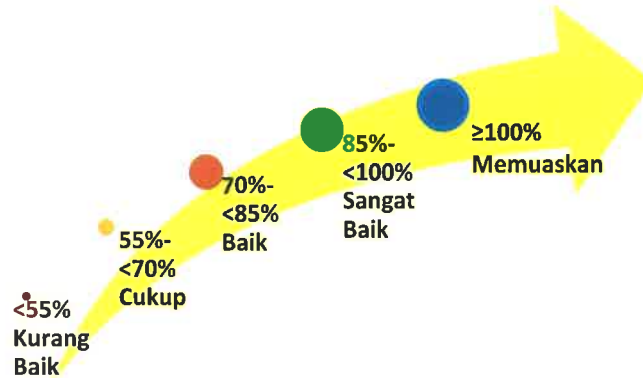
Selanjutnya akan dijabarkan kinerja Biro AKRB tahun 2023 berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang sudah ditetapkan pada PK Biro AKRB.

3.1.2. Capaian Kinerja Tahun 2023

Biro AKRB telah menyusun PK sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan kinerja yang diperjanjikan kepada pimpinan dan *stakeholders* dengan indikator kinerja dan target. Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja

indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam PK Biro AKRB dengan realisasinya. Capaian kinerja Biro AKRB tahun 2023 dilaporkan dan dimonitor secara triwulanan melalui SIKT2. Kategori capaian kinerja yang digunakan pada tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.5 Kategori Pencapaian Kinerja



Adapun hasil pengukuran atas perkembangan pencapaian kinerja 2023 dan perbandingannya dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Biro AKRB Tahun 2022 dan 2023

Sasaran Strategis Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis Pertama: Meningkatnya kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet				
Indikator Kinerja 1 (IKU): Jumlah unit ke deputian yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori "A"	2022	5 Unit Kerja	6 Unit Kerja	120%
Jumlah unit kerja ke deputian yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori "A"	2023	5 Unit Kerja	6 Unit Kerja	120%
Indikator Kinerja 2 (IKU): Persentase tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja	2022	81%	81,48%	100,60%
	2023	82%	81,89%	99,87%
Indikator Kinerja 3 (IKU): Jumlah komponen penilaian reformasi birokrasi yang nilainya meningkat	2022	6 Komponen	6 Komponen	100%
	2023	6 Komponen	6 Komponen	100%
Indikator Kinerja 4 (IKU): Persentase tingkat pemanfaatan dokumen reformasi birokrasi	2022	81%	80,30%	99,14%
	2023	82%	81,47%	99,35%
Sasaran Strategis Kedua: Terselenggaranya layanan persuratan serta ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet				
Indikator Kinerja (IKU): Persentase kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan	2022	81%	81,02%	100,02%
	2023	82%	82,50%	100,61%
Sasaran Strategis Ketiga: Meningkatnya kualitas pelaksanaan SAKIP dan RB Kedeputan Bidang Administrasi				
Indikator Kinerja 1: Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh Unit Kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Administrasi	2022	80%	80%	100%
	2023	80%	100%	125%

Sasaran Strategis Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Indikator Kinerja 2:				
Persentase pemenuhan data dukung LKE PMPRB Deputi Bidang Administrasi	2022	80%	100%	125%
	2023	80%	100%	125%
Sasaran Strategis Keempat:				
Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang efektif				
Indikator Kinerja 1:				
Indeks Revisi Program dan Anggaran Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2022	B (5-8 kali revisi)	B (7 kali revisi)	112,50%
	2023	B (5-8 kali revisi)	B (6 kali revisi)	125%
Indikator Kinerja 2:				
Persentase penyerapan anggaran pada Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2022	90%	96,68%	107,41%
	2023	90%	92,93%	103,26%

*Berdasarkan hasil evaluasi RB Tahun 2022 dari KemenPANRB

Analisis terhadap pencapaian kinerja setiap sasaran strategis selanjutnya akan dijabarkan berdasarkan indikator kerjanya.

SASARAN 1

Meningkatnya kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet

Sasaran pertama dicapai melalui kegiatan pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet. Pada tabel 3.2 dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023. Terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja memperoleh predikat **"Memuaskan"** dan 2 (dua) indikator kinerja memperoleh predikat **"Sangat Baik"** pada tahun 2023. Kondisi ini memperlihatkan kinerja yang sangat baik dari Biro AKRB yang tetap menunjukkan kinerja secara konsisten dengan tetap memperoleh predikat memuaskan pada 7 (tujuh) dari total 9 (sembilan) indikator kinerja yang ada.

IK1

Jumlah unit kerja ke deputian yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori "A"

Indikator kinerja pertama digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan SAKIP pada unit organisasi maupun unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet berdasarkan hasil penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet. Pada tahun 2023 terdapat sedikit perubahan indikator kinerja pertama sasaran pertama. Jika pada tahun 2022 indikator yang digunakan adalah Jumlah unit ke deputian yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori "A", pada tahun 2023 indikator yang digunakan adalah Jumlah unit **kerja** ke deputian yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal "A", perubahan pada indikator tersebut untuk menyelaraskan dengan satuan target dan bentuk tindak lanjut atas masukan dari Bappenas.

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Pertama Sasaran Pertama Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	5 Unit Kerja	6 Unit Kerja	120%
2022	6 Unit Kerja	6 Unit Kerja	100%
2023	6 Unit Kerja	6 Unit Kerja	100%

Capaian indikator kinerja pertama di tahun 2023 sama dengan tahun 2022, yaitu **100%** dengan predikat **"Memuaskan"**, target unit kerja dengan nilai minimal A sebanyak 6 unit kerja, sedangkan yang terealisasi sebanyak 6 unit kerja. Biro AKRB terus memberikan dukungan data dokumen SAKIP unit kerja kepada Inspektorat, dokumen telah diunggah pada aplikasi esr.menpan.go.id (e-SAKIP Reviu). Esr.menpan merupakan aplikasi penyampaian dokumen SAKIP ke KemenPANRB sebagai evaluator dari SAKIP, dan dapat dimanfaatkan instansi sebagai aplikasi pengendalian kelengkapan dokumen SAKIP unit organisasi dan unit kerja.

Realisasi dari indikator ini dihitung berdasarkan jumlah unit kerja yang memperoleh nilai hasil evaluasi SAKIP minimal A dari Inspektorat. Berikut ini data perolehan nilai dari tahun 2021 sampai dengan 2023.

Tabel 3.4 Nilai SAKIP Kedeputian di Lingkungan Sekretariat Kabinet

No.	Unit Kedeputian	2021		2022		2023	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	80,47	A (Memuaskan)	87,40	A (Memuaskan)	87,60	A (Memuaskan)
2	Kedeputian Bidang Perekonomian	80,47	A (Memuaskan)	87,40	A (Memuaskan)	87,60	A (Memuaskan)
3	Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	80,11	A (Memuaskan)	87,40	A (Memuaskan)	87,60	A (Memuaskan)
4	Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	80,47	A (Memuaskan)	87,40	A (Memuaskan)	87,60	A (Memuaskan)
5	Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet	80,63	A (Memuaskan)	87,40	A (Memuaskan)	87,60	A (Memuaskan)
6	Kedeputian Bidang Administrasi	80,11	A (Memuaskan)	87,40	A (Memuaskan)	87,70	A (Memuaskan)

Berdasarkan data pada tabel di atas, pada tahun 2023 terdapat enam unit kedeputian mendapatkan nilai **"A (Memuaskan)"**. Hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat menunjukkan bahwa 6 (enam) Kedeputian masih masuk dalam kategori "Memuaskan" dan mengalami peningkatan nilai dari tahun sebelumnya. Nilai yang diperoleh oleh 5 (lima) Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kedeputian Bidang Perekonomian, Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet memperoleh nilai SAKIP yang sama dari

Inspektorat, yaitu **87,60 (A)**, sedangkan 1 (satu) kedeputian memperoleh nilai **87,70 (A)**, yaitu Kedeputan Bidang Administrasi.

Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kedeputan Bidang Perekonomian, Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Kedeputan Bidang Dukungan Kerja Kabinet meningkat sebesar 0,20 poin. Sedangkan Kedeputan Bidang Administrasi meningkat 0,30 poin dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya.

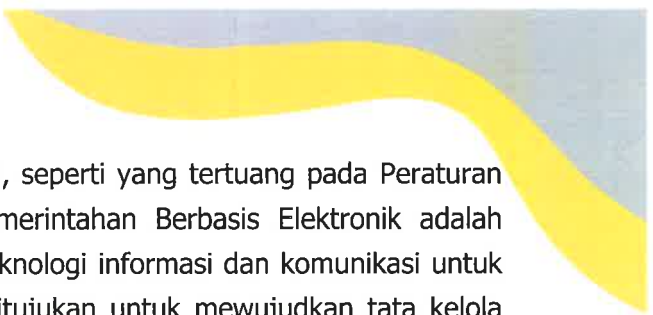
Evaluasi dilakukan Inspektorat berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Kabinet yang ditetapkan oleh Plt. Inspektur Sekretariat Kabinet. Pada tahun 2022 cakupan penilaian evaluasi terdiri dari 3 (tiga) buah komponen, yaitu: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; dan Pelaporan Kinerja. Namun, pada tahun 2023 cakupan penilaian evaluasi terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja dan Capaian Sasaran. Melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat menyampaikan nilai dan saran perbaikan atau rekomendasi terhadap implementasi SAKIP di unit kerja. Berikut ini rangkuman hasil penilaian atas implementasi SAKIP tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat pada tahun 2023.

Tabel 3.5 Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja per Komponen Tahun 2022

Komponen	Bobot	Polhukam/PMK/ Marves/ DKK	Perekonomian	Administrasi
Perencanaan Kinerja	30	27	27,60	27
Pengukuran Kinerja	30	24,60	25,50	25,50
Pelaporan Kinerja	20	18	17	18
Evaluasi Kinerja	10	9	8,50	8,20
Capaian Sasaran	10	9	9	9
Total Capaian Kinerja	100	87,60	87,60	87,70

Dari tabel di atas, terlihat bahwa metode atau pedoman yang digunakan untuk mengevaluasi masing-masing kedeputian menggunakan 5 (lima) komponen. Dari sisi rekomendasi, Inspektorat Sekretariat Kabinet memberikan beberapa saran perbaikan terkait dengan implementasi SAKIP pada laporan nomor LHE-8/INSP/12/2023 tanggal 22 Desember 2023 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kedeputan Bidang Administrasi, yaitu:

- Menyelesaikan penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE Sekretariat Kabinet;
- Membuat data inventarisasi dan evaluasi atas seluruh aplikasi yang telah dibangun untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut telah dimanfaatkan dengan baik;
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM yang melakukan evaluasi AKIP internal dengan mengikutsertakannya dalam program sosialisasi atau pendidikan dan pelatihan terkait.



Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dengan memanfaatkan Teknologi Informasi secara menyeluruh dan terpadu. dalam Perpres SPBE diatur bahwa, Instansi Pemerintah (Pusat dan Daerah) menyusun Peta Rencana SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Pimpinan Instansi masing-masing. Penyusunan Peta Rencana SPBE berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan rencana strategis Instansi Pusat. Muatan Peta Rencana SPBE Nasional yang dijadikan acuan dalam penyusunan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat, meliputi aspek Kebijakan dan Tata Kelola SPBE; Manajemen SPBE; Layanan SPBE; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE; dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Berkaitan dengan penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE Sekretariat Kabinet, Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) telah selesai menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Sekretariat Kabinet 2024-2028. Arsitektur dan peta rencana telah disusun karena Pusdatin telah melakukan kegiatan, yaitu melaksanakan reviu kebijakan dan Tata Kelola SPBE di lingkungan Sekretariat Kabinet melalui pembahasan dan pengkajian berdasar hasil Monitoring dan Evaluasi SPBE Tahun 2023 dan keterkinian (*novelty*) kebijakan SPBE Nasional.

Selain hal di atas, Pusdatin juga telah memastikan seluruh aplikasi yang telah dibangun di lingkungan Sekretariat Kabinet sebanyak 12 (dua belas) aplikasi sistem dan teknologi informasi yang telah diimplementasikan dan telah dimanfaatkan dengan baik. Dapat dilihat dari hasil survei Layanan Pusdatin tahun 2023 yang menunjukkan nilai rerata dari hasil pengukuran kepuasan pada semester 1 dan 2 tahun 2023, maka didapatkan angka persentase kepuasan pengguna sistem dan teknologi informasi yang diimplementasikan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada Tahun 2023 dengan nilai sebesar **82,70%** yang berarti memperoleh hasil pada tingkat **"Sangat Baik"**.

Pada tahun 2023, Inspektorat telah melakukan beberapa upaya dalam rangka menindaklanjuti saran perbaikan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, antara lain:

- Menyusun *draft* Petunjuk Teknis Audit Kinerja dan melaksanakan audit kinerja sesuai petunjuk teknis tersebut
- Mengikutsertakan Auditor dalam:
 1. Pelatihan audit infrastruktur dan aplikasi SPBE sebanyak 10 orang,
 2. Diklat *Certified Data Science Practitioner* (CDSP) sebanyak 2 orang,
 3. Diklat Sertifikasi Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi sebanyak 2 orang.
- Melaksanakan Audit TIK SPBE
- Meningkatkan peran konsultasi, dengan menyusun pertimbangan atas kegiatan rapat luar kantor yang dilakukan oleh unit kerja.

Persentase Tingkat Pemanfaatan Dokumen Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran indikator kinerja kedua sasaran pertama dilaksanakan dengan menyelenggarakan survei. Survei Kepuasan Layanan dan Pemanfaatan Dokumen di lingkungan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara kolektif. Sampel pada survei ini ditentukan berdasarkan pihak yang berhubungan langsung dengan unit kerja pelayanan dengan memperhatikan keterwakilan dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *probability sampling - cluster sampling*, yaitu dengan memperhatikan keterwakilan dari seluruh unit kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet. Dari ketentuan tersebut, masing-masing unit kerja Eselon II diberikan 4 (empat) responden yang keterwakilannya akan diisi oleh 3 (tiga) orang pejabat struktural yang terdiri atas pejabat eselon II, III dan IV, serta 1 (satu) orang staf. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa seluruh tingkat jabatan berhubungan secara langsung dengan layanan yang diberikan oleh Biro AKRB, dalam berbagai bentuk dan kesempatan. Jumlah minimum sampel yang digunakan adalah sebanyak 5 (lima) kali jumlah pertanyaan yang diajukan. Pengukuran hasil survei menggunakan skala *likert*, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti. Survei dilaksanakan secara *online* dengan mengisi kuesioner melalui URL <https://www.surveymonkey.com/r/2023surveydepmin>. Penyebarluasan survei melalui memorandum M.0416/Adm-3/06/2023 pada tanggal 26 Juni 2023 dan memorandum M.0693/Adm-3/12/2023 pada tanggal 08 Desember 2023 perihal Permohonan Pengisian Survei Kepuasan Layanan di Lingkungan Deputy Bidang Administrasi Tahun 2023 yang didiseminasikan melalui Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT).

Survei tahun 2023 terlaksana dengan 120 (seratus dua puluh) responden yang telah mengisi survei secara lengkap. Kriteria interpretasi nilai berdasarkan interval perolehan hasil survei dengan menggunakan 4 (empat) skala pilihan persepsi, maka rentang indeks adalah 0,75. Berikut ini interpretasi nilai berdasarkan interval.

Gambar 3.6 Interpretasi Skor Penilaian Survei

NILAI INTERVAL	INDEKS	INTERPRETASI
1 - 1,7499	25% - 43,749%	SANGAT TIDAK MEMUASKAN/ TIDAK BERMANFAAT
1,745 - 2,499	43,75% - 62,49%	TIDAK MEMUASKAN/ TIDAK BERMANFAAT
2,50 - 3,249	62,50% - 81,249%	MEMUASKAN/ BERMANFAAT
3,25 - 4	81,25% - 100%	SANGAT MEMUASKAN/ SANGAT BERMANFAAT

Survei tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi disusun berdasarkan 4 (empat) kategori, yaitu:

- Pemanfaatan dokumen/laporan dalam perbaikan perencanaan program, kegiatan, anggaran dan kinerja;
- Pemanfaatan dokumen/laporan dalam pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kinerja dan anggaran;
- Pemanfaatan dokumen/laporan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran organisasi; dan
- Pemanfaatan dokumen/laporan untuk peningkatan kinerja.

Selain untuk mengukur realisasi indikator kinerja kedua, survei dilakukan serentak untuk menyediakan data realisasi indikator kinerja keempat, yaitu "Persentase tingkat pemanfaatan dokumen Reformasi Birokrasi" dan indikator kinerja sasaran kedua, yaitu "Persentase kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan".

Dokumen akuntabilitas kinerja yang dinilai tingkat pemanfaatannya adalah IKU, PK, LKj, dan Data Capaian Kinerja. Hasil dari penghitungan survei pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja tahun 2023, sebagai berikut.

Gambar 3.7 Hasil Perbandingan Survei Pemanfaatan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022-2023

Kategori	2022	2023 Smt 1	2023 Smt 2	2023	Kenalkan/ Penurunan
Pemanfaatan dokumen/laporan di bawah ini dalam perbaikan perencanaan program, kegiatan, anggaran, dan kinerja	81,44%	81,48%	83,33%	82,41%	0,96%%
Pemanfaatan dokumen/laporan di bawah ini dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran	81,17%	81,19%	82,76%	81,98%	0,81%
Pemanfaatan dokumen/laporan di bawah ini untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran organisasi	81,74%	80,33%	82,50%	81,42%	-0,32%
Pemanfaatan dokumen/laporan di bawah ini untuk peningkatan kinerja	81,60%	80,68%	82,81%	81,75%	0,13%
Total	81,48%	80,92%	82,85%	81,89%	0,41%

Berikut tabel di bawah ini memperlihatkan target, realisasi dan capaian indikator kedua sasaran pertama pada tahun 2021 hingga 2023.

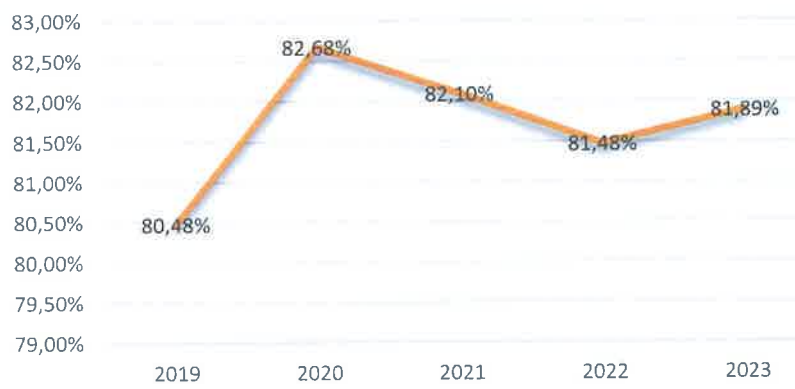
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kedua Sasaran Pertama Tahun 2021 s.d. 2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	90%	82,68%	91,87%
2021	80%	82,10%	102,63%
2022	81%	81,48%	100,60%
2023	82%	81,89%	99,87%

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator kinerja kedua sasaran pertama Biro AKRB pada tahun 2023 adalah 99,87% dengan predikat **Sangat Baik** dengan target 82% dan realisasi 81,89%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 100,60% maka terdapat penurunan sebesar 0,73%. Namun nilai tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja pada tahun 2023 masih berada pada tingkat **"Sangat Memuaskan/Sangat Bermanfaat"**.

Optimalisasi fitur Dialog Kinerja pada aplikasi SIKT bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan individu, juga mendorong interaksi positif antara atasan dan bawahan serta dapat mengidentifikasi masalah, dan potensi/kompetensi pegawai sebagai salah satu alat dalam perencanaan pengembangan pegawai. Optimalisasi fitur ini dilakukan sebagai salah satu inovasi serta peningkatan layanan dalam memanfaatkan aplikasi SIKT. Tren hasil tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja dapat digambarkan pada grafik di bawah ini.

Gambar 3.8 Tren Tingkat Pemanfaatan Dokumen Akuntabilitas Kinerja 2019-2023



Berdasarkan capaian tersebut, beberapa upaya perbaikan telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas dokumen/laporan akuntabilitas kinerja, antara lain:

- Memberikan sosialisasi atas peraturan-peraturan baru yang berkaitan dengan dokumen/laporan akuntabilitas kinerja;
- Melakukan pendampingan dalam penyusunan dokumen/laporan akuntabilitas kinerja;
- Mengundang narasumber dari Kementerian PANRB maupun BKN untuk melakukan asistensi serta mensosialisasikan ke seluruh unit kerja;

- d. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara intensif dan tepat waktu dengan unit kerja dalam penyusunan dan *monitoring* serta evaluasi PK, LKj, SKP, dan penilaian capaian data kinerja triwulanan baik secara formal (memorandum dan rapat) maupun secara informal (*whatsapp* grup khusus SAKIP).

Pada tahun 2023 Biro AKRB telah secara optimal melakukan penyebarluasan informasi terkait dokumen kinerja, antara lain melalui penyampaian dokumen dimaksud dalam bentuk buku kepada masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Selain itu, Biro AKRB melalui Pusdatin telah mengunggah dokumen/laporan tersebut ke dalam *website* Sekretariat Kabinet guna mempermudah akses pejabat dan pegawai Sekretariat Kabinet terhadap dokumen kinerja. Seluruh dokumen maupun laporan tersebut diunggah juga pada *link* [https:// esr.menpan.go.id](https://esr.menpan.go.id) sebagai kelengkapan pemenuhan dokumen SAKIP di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan saran dan masukan dari responden terhadap hasil survei terkait dokumen akuntabilitas kinerja pada tahun 2022, Biro AKRB telah memetakan tindak lanjut yang telah dilakukan di tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 3.7 Tindak Lanjut Hasil Survei Tingkat Pemanfaatan Dokumen/Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

No.	Subjek Saran/ Masukan	Tindak Lanjut
1.	Penyampaian dokumen	Biro AKRB telah menyampaikan dokumen/laporan kepada masing-masing unit kerja melalui memorandum:
		1 M.0132/Adm-3/02/2023, tanggal 17 Februari 2023 Pengunggahan Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2022 pada <i>website</i> Sekretariat Kabinet
		2 M.0184/Adm-3/03/2023, tanggal 09 Maret 2023 Penyampaian Buku Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2022 dan Buku Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet (Perseskab Nomor 1 Tahun 2023)
		3 M.0139/Adm-3/02/2023, tanggal 22 Februari 2023 Pengunggahan Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Kabinet, Eselon I, dan Eselon II Tahun 2023 pada <i>Website</i> Sekretariat Kabinet
		4 M.0185/Adm-3/03/2023, tanggal 09 Maret 2023 Penyampaian Buku Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2023
		5 M.0542/Adm-3/09/2023, tanggal 08 September 2023 Pengunggahan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 pada <i>website</i> Sekretariat Kabinet
2.	Penyusunan dokumen	▪ Biro AKRB telah melakukan koordinasi dan mengawal proses perencanaan kinerja melalui penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan mengadakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (bimtek) aplikasi e-Kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang diadakan pada tanggal 15 Maret 2023 di Hotel Gran Melia, Jakarta dengan mengundang narasumber dari BKN, dan diikuti oleh perwakilan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.

3.	Sistem Teknologi Informasi	▪ Biro AKRB telah membuat <i>Whatsapp Group</i> untuk mengoptimalkan fungsi FO dalam mensosialisasikan penyusunan dan pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di unit kedeputiannya. ▪ Biro AKRB telah mengunggah dokumen akuntabilitas kinerja/laporan kinerja sebagai salah satu bentuk komitmen menjalankan amanah PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015 bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib mengunggah dokumen kinerja instansi pada <i>esr.menpan.go.id</i>. ▪ Biro AKRB berkolaborasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) dalam melakukan pembangunan aplikasi SIKT dengan melibatkan pihak eksternal dalam pembangunan aplikasi tersebut. Pusdatin dalam hal ini telah menyusun dan menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) pada bulan April 2023.
----	----------------------------	--

Selanjutnya, dari hasil survei tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja tahun 2023, Biro AKRB memperoleh saran dan masukan, antara lain sebagai berikut:

1. Pendampingan dalam pengisian SKP dan dokumen kinerja lainnya dilakukan secara lebih intens;
2. Sosialisasi dan asistensi peraturan terkait kinerja organisasi dan individu agar lebih ditingkatkan tidak hanya kepada FO atau PIC perwakilan dari unit kerja saja, namun juga kepada semua Pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet, sehingga unit kerja tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya.

IK3

Jumlah Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi yang Nilainya Meningkat

Biro AKRB sebagai koordinator pelaksanaan RB di Sekretariat Kabinet, senantiasa mengawal pelaksanaan program dan kegiatan RB tahun 2023 di Sekretariat Kabinet, melalui berbagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Indikator ketiga pada sasaran pertama adalah "Jumlah komponen penilaian reformasi birokrasi yang nilainya meningkat". Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur kinerja Biro AKRB dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet melalui peningkatan hasil penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan oleh KemenPANRB. Target yang ditetapkan dalam PK tahun 2023 sebanyak 6 (enam) komponen sama dengan tahun 2022.

Namun pada tahun 2023, Kementerian PANRB melakukan perubahan evaluasi RB dengan menerbitkan surat nomor: B/01/RB.06/2023 tentang Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik RB pada tanggal 18 Januari 2023. Perubahan tersebut guna menindaklanjuti arahan Presiden dan Wakil Presiden RI tentang pelaksanaan RB yang memberikan dampak kepada masyarakat serta pembangunan, maka Kementerian PANRB melakukan penyempurnaan terhadap Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020

tentang *Road Map* RB 2020-2024 serta Permen PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB.

Untuk melaksanakan amanah dimaksud Setkab melakukan perubahan tujuan dan sasaran RB, kegiatan RB yang berdampak, fokus pada pelaksanaan RB, dan penajaman indikator RB, yang dituangkan dalam Perseskab yang sedang dalam proses penyusunan dan penetapan. Dalam hal ini, *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan "*double track*", yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan "**RB General**", serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan "**RB Tematik**".

Dengan adanya perubahan strategi pada *Road Map* Nasional dimaksud, tahun 2023 ini merupakan tahun transisi kegiatan perubahan reformasi birokrasi dari 8 area perubahan menjadi terfokus pada 21 kegiatan utama yang secara langsung mendapat penilaian dari K/L *leading sector*, namun tataran implementasi dari kegiatan yang telah direncanakan tetap dalam pemantauan Kementerian PANRB. Indikator kinerja tersebut telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro AKB Tahun 2023 pada Januari 2023, sehingga indikator capaian kinerja ini menggunakan hasil evaluasi atas tahun 2022 karena dianggap telah tidak relevan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.8 menunjukkan target beserta angka realisasi dan persentase capaian indikator kinerja ketiga pada tahun 2022 dan 2023.

**Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja
Indikator Ketiga Sasaran Pertama Tahun 2021 s.d. 2022**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	6	8	133,33%
2023	6	8	133,33%

Berdasarkan data di atas capaian indikator kinerja kedua Biro AKB tahun 2022 adalah 133,33% dengan predikat **Memuaskan**. Mampu menyokong capaian Deputy Bidang Administrasi dan Sekretariat Kabinet dengan perolehan Indeks RB Sekretariat Kabinet tahun 2022 telah mencapai predikat "Memuaskan" dengan nilai 84,83 kategori "A". Hasil evaluasi pelaksanaan RB Sekretariat Kabinet tahun 2022 disampaikan KemenPANRB melalui surat nomor B/713/RB.06/2022, tanggal 6 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022.

Berikut ini tabel hasil evaluasi RB Sekretariat Kabinet oleh Kementerian PANRB tahun 2022.

Tabel 3.9 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Tahun 2022
A.	Komponen Pengungkit		
1	Pemenuhan	20,00	17,52
2	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,64
3	Reform	30,00	25,34

	Total Komponen Pengungkit	60,00	49,50
B.	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,60
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,16
3	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,02
4	Kinerja Organisasi	10,00	8,55
	Total Komponen Hasil	40,00	35,33
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	84,83

IK4

Persentase Tingkat Pemanfaatan Dokumen Reformasi Birokrasi

Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja keempat sasaran pertama Biro AKRB adalah 99,35% dengan predikat **Sangat Baik**. Tabel 3.12 memperlihatkan target, realisasi dan capaian indikator keempat sasaran pertama pada tahun 2021 hingga 2023. Capaian pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,21%, dari 99,14% menjadi 99,35%.

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Keempat Sasaran Pertama Tahun 2021, 2022 dan 2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	80%	80,28%	100,35%
2022	81%	80,30%	99,14%
2023	82%	81,47%	99,35%

Cara pengukuran realisasi atas indikator kinerja "Persentase Tingkat Pemanfaatan Dokumen Reformasi Birokrasi" yakni dengan pelaksanaan survei dengan kuesioner menggunakan 4 (empat) aspek pemanfaatan dokumen. Dokumen RB yang disurvei tingkat pemanfaatannya adalah Rencana Aksi Tahun 2023 dan Penajaman *Road Map* Tahun 2020-2024. Berikut ini merupakan perbandingan hasil survei tingkat pemanfaatan dokumen RB tahun 2022 s.d. 2023.

Gambar 3.9 Hasil Survei Pemanfaatan Dokumen Reformasi Birokrasi

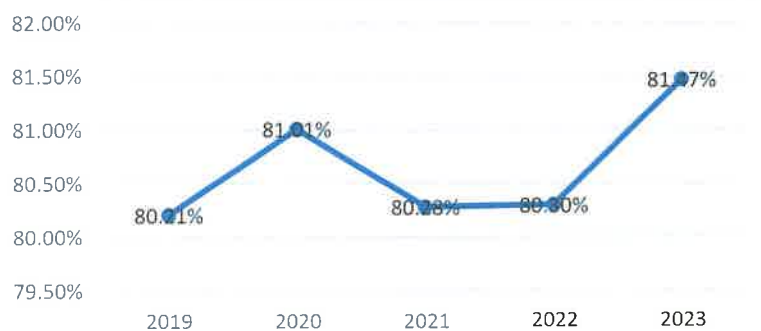
Kategori	2022	2023 Smt 1	2023 Smt 2	2023	Kenaikan/ Penurunan
Pemanfaatan dokumen/ laporan di bawah ini dalam perbaikan perencanaan program, kegiatan, anggaran, dan kinerja	80,62%	80,28%	82,92%	81,60%	0,98%
Pemanfaatan dokumen/ laporan di bawah ini dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran	80,16%	80,28%	82,29%	81,28%	1,12%
Pemanfaatan dokumen/ laporan di bawah ini untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran organisasi	80,23%	80,50%	82,50%	81,50%	1,27%
Pemanfaatan dokumen/ laporan di bawah ini untuk peningkatan kinerja	80,18%	80,28%	82,71%	81,50%	1,32%
Total	80,30%	80,33%	82,60%	81,47%	1,17%

Kesadaran (*awareness*) dari pegawai/pejabat untuk memanfaatkan dokumen RB selama tahun 2023 sedikit naik namun tidak terlalu signifikan sebesar **1,17%** dari 80,30% menjadi 81,47%. Namun, berdasarkan hasil survei, pada keempat kategori semuanya mengalami peningkatan.

Melihat dari empat kategori yang dinilai, pada kategori pertama yaitu pemanfaatan dokumen perencanaan mengalami peningkatan sekitar **0,98%**, pada kategori kedua yaitu pemanfaatan dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran meningkat sekitar **1,12%**, pada kategori ketiga yaitu pemanfaatan dokumen pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran organisasi meningkat sebesar **1,27 %**, dan kategori terakhir yaitu kategori pemanfaatan dokumen untuk peningkatan kinerja meningkat sebesar **1,32%**.

Program/kegiatan RB telah disebarluaskan melalui portal RB dan sebagian besar kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Aksi RB telah dilaksanakan dengan baik. Nilai tingkat pemanfaatan dokumen RB pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar **0,46%** dibandingkan dengan tahun 2020 yang tergambar pada gambar 3.11.

Gambar 3.10 Tren Tingkat Pemanfaatan Dokumen Reformasi Birokrasi 2019-2023



Berdasar penilaian hasil persepsi unit kerja tersebut bahwa pemanfaatan dokumen reformasi birokrasi (RB) pada tahun 2023 secara keseluruhan terdapat peningkatan. Tren capaian peningkatan dimaksud menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik dan dapat dimanfaatkan dalam memperbaiki program/kegiatan RB secara berkelanjutan.

Hal-hal yang telah dilakukan diantaranya bahwa Sekretariat Kabinet menindaklanjuti perubahan/penajaman *Road Map* dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 2020-2024. Saat ini kegiatan RB tidak lagi ditetapkan dengan 8 area perubahan, melainkan berfokus pada kegiatan RB General dan RB Tematik. Perencanaan kegiatan RB ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020-2024, dan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 71 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2023. Dokumen perencanaan RB tersebut telah dimanfaatkan unit kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan RB dan memperbaiki tata kelola Sekretariat Kabinet.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian agar dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), diantaranya:

- Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintah, perlu kiranya pada setiap tahapan pelaksanaan RB di Sekretariat Kabinet, mulai dari perencanaan, pemantauan, dan evaluasi (berdasar kualitas pemenuhan dokumen yang telah direncanakan dan diperjanjikan) dapat dilakukan reviu dan evaluasi oleh APIP. Reviu dan evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Perlunya melakukan langkah perbaikan dan meningkatkan koordinasi dengan K/L terkait sebagai *leading sector* penilai Hasil Antara, agar nilai Hasil Antara RB Sekretariat Kabinet dapat meningkat (khususnya untuk nilai Hasil Antara yang masih rendah).
- Perlu adanya perbaikan dan peningkatan kualitas dari setiap komponen pada kegiatan utama yang diampu oleh unit kerja.

- d. Perlunya sinergitas yang kuat antara Inspektorat selaku penjamin kualitas dan pengawas internal dengan unit kerja pengampu kegiatan utama dalam mengawal setiap kegiatan utama yang akan dievaluasi oleh masing-masing meso dan setiap *evidence* dari rencana aksi yang harus dapat dipenuhi oleh unit kerja.

SASARAN 2

Terselenggaranya layanan persuratan serta ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet

Sasaran kedua dicapai melalui pemberian pelayanan dan dukungan administrasi ketatausahaan pimpinan dan perbantuan, pengendalian persuratan dan penomoran Peraturan Sekretaris Kabinet, Keputusan Sekretaris Kabinet, peraturan dan keputusan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet. Untuk mengukur pencapaian sasaran kedua digunakan indikator kinerja yaitu "Persentase kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan". Sasaran kedua Biro ACRB murni pelayanan yang tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan prima agar pihak yang dilayani merasa puas. Tingkat kepuasan seseorang tergantung dari persepsi masing-masing individu terhadap pelayanan yang diterimanya. Cara yang paling tepat untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan adalah dengan melaksanakan survei dengan maksud untuk memperoleh gambaran rasa puas serta memperoleh masukan dan saran untuk ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan kinerja pelayanan Biro ACRB.

IK

Persentase Kepuasan Layanan Persuratan dan Ketatausahaan Pimpinan

Biro ACRB memiliki fungsi penyelenggaraan pelayanan dan dukungan administrasi ketatausahaan pimpinan dan perbantuan, serta pengendalian persuratan dan penomoran Peraturan Sekretaris Kabinet, Keputusan Sekretaris Kabinet, serta peraturan dan keputusan lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet. Indikator pada sasaran kedua mengukur kinerja Biro ACRB dalam memberikan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan.

Pada tahun 2023 capaian kinerja sasaran kedua Biro ACRB adalah 100,61% dengan predikat "**Memuaskan**". Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 100,02% maka terdapat peningkatan sebesar 0,59% walaupun terdapat peningkatan target dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Kedua
Tahun 2022 dan 2023**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	81%	81,02%	100,02%
2023	82%	82,50%	100,61%

Analisis lebih lanjut akan dilihat berdasarkan aspek kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan yang diberikan oleh Biro AKRB. Survei terhadap kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan diukur berdasarkan 5 (lima) aspek pelayanan yang masing-masing diukur dengan pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12 Aspek Pelayanan dalam Survei Pelayanan Ketatausahaan dan Persuratan

Aspek Pelayanan	Pernyataan
1. Ketanggapan dalam pelayanan (<i>responsiveness</i>)	1. Ketanggapan pelayanan ketatausahaan dan persuratan. 2. Kecepatan pelayanan ketatausahaan dan persuratan. 3. Kemudahan pelayanan ketatausahaan dan persuratan.
2. Keandalan dalam pelayanan (<i>reliability</i>)	1. Kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan ketatausahaan dan persuratan. 2. Ketepatan pelayanan ketatausahaan dan persuratan.
3. Kepastian dalam pelayanan (<i>assurances</i>)	1. Kepastian pelayanan ketatausahaan dan persuratan. 2. Keakuratan pelayanan ketatausahaan dan persuratan.
4. Sikap dalam pelayanan (<i>empathy</i>)	1. Keramahan pegawai dalam memberikan pelayanan ketatausahaan dan persuratan. 2. Kepedulian pegawai dalam pelayanan ketatausahaan dan persuratan.
5. Sarana dan prasarana fisik (<i>tangible</i>)	1. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan ketatausahaan dan persuratan. 2. Kenyamanan dan kerapihan ruangan pelayanan ketatausahaan dan persuratan.

Mekanisme pelaksanaan survei berbarengan dengan pengukuran realisasi atas indikator kinerja kedua dan keempat sasaran pertama, dilakukan secara *online* dengan responden sebanyak 120 (seratus dua puluh) responden.

Hasil survei terhadap kepuasan layanan ketatausahaan dan persuratan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13 Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Layanan Ketatausahaan dan Persuratan Tahun 2022 dan 2023

No.	Aspek Kepuasan	Persentase rata-rata Kepuasan	
		2022	2023
1	Ketanggapan dalam pelayanan (<i>responsiveness</i>)	81.53%	82.89%
2	Keandalan dalam pelayanan (<i>reliability</i>)	80.22%	82.79%
3	Kepastian dalam pelayanan (<i>assurances</i>)	80.80%	82.24%
4	Sikap dalam pelayanan (<i>empathy</i>)	81.91%	82.46%
5	Sarana dan prasarana fisik (<i>tangible</i>)	80.66%	82.12%
	Persentase Tingkat Kepuasan	81,02%	82.50%

Dari tabel di atas, hasil survei layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan mengalami peningkatan dibandingkan hasil survei pada tahun sebelumnya. Nilai kepuasan Layanan Persuratan dan Ketatausahaan Pimpinan pada tahun 2023 memiliki rata-rata nilai sebesar 82.50% atau dengan kenaikan sebesar **1.50%** dari tahun 2022.

Melihat dari 5 (lima) aspek kepuasan yang dinilai, maka layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan dalam aspek **ketanggapan dalam pelayanan (*responsiveness*) memperoleh nilai yang paling tinggi yaitu sebesar 82.89%**, disusul aspek Keandalan dalam pelayanan (*reliability*) sebesar 82.79%, aspek sikap dalam pelayanan (*empathy*) sebesar 82.46%, aspek kepastian dalam pelayanan (*assurance*) sebesar 82.24%, dan yang terakhir aspek sarana dan prasarana fisik (*tangible*) sebesar 82.12%.

Dari peningkatan nilai kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan pada tahun 2023, dapat terlihat bahwa semua aspek mengalami kenaikan diantaranya aspek keandalan dalam pelayanan (*reliability*) sebesar 2,57% yang mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya, aspek sarana dan prasarana fisik (*tangible*) sebesar 1,46%, disusul oleh aspek kepastian dalam pelayanan (*assurances*) sebesar 1,44%, aspek ketanggapan dalam pelayanan (*responsiveness*) sebesar 1,36%, kemudian peningkatan terkecil terjadi pada aspek sikap dan pelayanan (*empathy*) sebesar 0,55%.

Sedangkan pada Tahun 2023, aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih untuk ditingkatkan adalah aspek sarana dan prasarana fisik (*tangible*).

Beberapa saran dan masukan dari responden terkait pelayanan ketatausahaan dan pimpinan yang perlu ditindaklanjuti di tahun mendatang, diantaranya:

1. Fleksibilitas bisnis proses SIPT.
2. Peningkatan kecepatan penyampaian persuratan.
3. Perbaikan kendala SIPT.
4. Penggunaan Cap Jabatan dan Cap Dinas oleh Unit Kerja Eselon II.

Atas saran dan masukan survei tahun sebelumnya, pada tahun 2023 Biro AKRB telah melakukan hal sebagai berikut:

1. Peningkatan Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT) menggunakan platform aplikasi umum berbasis korespondensi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan di lingkungan Sekretariat Kabinet. Korespondensi yang dinamis di lingkungan Sekretariat Kabinet secara fleksibel dapat digunakan melalui SIPT. Fleksibilitas ini tentunya didukung oleh beberapa modul SIPT yang dirancang dengan baik namun tetap memperhatikan aspek keamanan informasi teknologi. Modul Manajemen Surat Masuk, Modul Manajemen Surat Keluar, Modul Manajemen Disposisi, dan Modul Manajemen Pendelegasian. Modul-modul tersebut dapat menyesuaikan dengan role Pejabat/Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet.
2. Tersedianya Penyampaian surat masuk dilaksanakan 1 (satu) pintu melalui Unit Persuratan Sekretariat Kabinet dengan ketentuan penerimaan terhadap surat yang ditujukan kepada Sekretaris Kabinet/Eselon I/II dan pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet dalam

hal kedinasan. Pendistribusian surat masuk telah dilaksanakan secara online melalui SIPT. Namun, khusus surat yang ditujukan kepada Sekretaris Kabinet, guna memberikan layanan prima, subbagian Persuratan juga melaksanakan pendistribusiannya secara fisik melalui ledger Sekretaris Kabinet. Berkas fisik yang memiliki ledger Sekretaris Kabinet juga mendapatkan disposisi Pimpinan kepada unit-unit pengolah terkait, selain itu disposisi juga disampaikan melalui SIPT.

3. SIPT termasuk platform *SaaS*, suatu model penyampaian aplikasi perangkat lunak oleh suatu vendor perangkat lunak yang mengembangkan aplikasi *web* yang diinangi dan dioperasikan untuk digunakan oleh pelanggannya melalui internet. Kendala yang terjadi memerlukan perbaikan oleh Penyedia SIPT yang telah bekerjasama dengan Sekretariat Kabinet. Pada Tahun 2023, SIPT sempat tidak dapat diakses selama beberapa kali, karena ada hal teknis dalam licensi yang perlu diperbaharui. Untuk kendala mayor tidak terjadi, karena telah mengalami beberapa perbaikan secara berkelanjutan sejak penggunaannya pada Tahun 2019. Kendala yang sering terjadi adalah tidak dapat diakses. Namun, hal tersebut sudah dapat ditangani dengan baik, dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023, SIPT belum mengalami kendala.

Pada tahun 2022, Biro AKRB menambahkan sasaran strategis baru di PK, yaitu "Meningkatnya kualitas pelaksanaan SAKIP dan RB Kedeputan Bidang Administrasi" yang diukur melalui 2 (dua) indikator "Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh Unit Kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Administrasi" dan "Persentase pemenuhan data dukung LKE PMPRB Deputy Bidang Administrasi". Hal ini menunjukkan bahwa Biro AKRB berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SAKIP dan RB di lingkungan Kedeputan Bidang Administrasi. Namun, pada tahun 2023 indikator "Persentase pemenuhan data dukung LKE PMPRB Deputy Bidang Administrasi" direvisi sehingga berubah menjadi "Persentase pemenuhan data dukung pelaksanaan reformasi birokrasi Deputy Bidang Administrasi". Adapun analisis atas capaian kinerja akan diuraikan pada masing-masing indikator kinerja berikut ini.

SASARAN 3

Meningkatnya kualitas pelaksanaan SAKIP dan RB Kedeputan Bidang Administrasi

IK1

Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh Unit Kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Administrasi

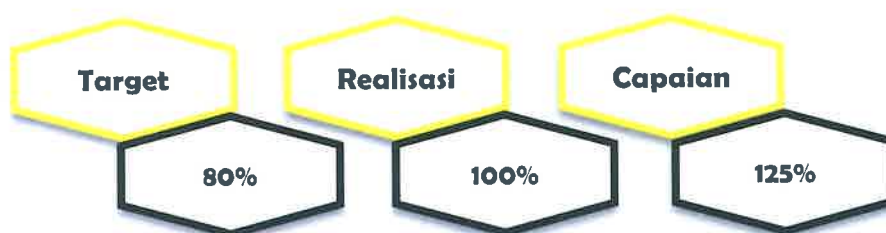
Indikator pertama sasaran ketiga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SAKIP Deputy Bidang Administrasi dengan mengoordinasikan upaya tindak lanjut atas

rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat. Inspektorat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SAKIP Deputy Bidang Administrasi dan menghasilkan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Administrasi. Melalui memorandum dari Inspektur Nomor: M.19/Insp/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 perihal Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada unit kerja Kedeputian Bidang Administrasi Tahun Anggaran 2022, Inspektorat telah meneliti tindak lanjut yang telah dilakukan. Berdasarkan penelitian tersebut disampaikan bahwa rekomendasi dinyatakan "Ditindaklanjuti seluruhnya" (100%). Berikut rekomendasi dari Inspektorat yang telah ditindaklanjuti.

Tabel 3.14 Saran dan Tindak Lanjut

No	Saran	Tindak Lanjut
1	Menyelesaikan penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE Sekretariat Kabinet	Telah disusunnya Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Sekretariat Kabinet Tahun 2024-2028
2	Membuat data inventarisasi dan evaluasi atas seluruh aplikasi yang telah dibangun untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut telah dimanfaatkan dengan baik	Tersedianya Daftar Inventarisasi dan Evaluasi atas seluruh aplikasi yang telah dibangun di lingkungan Sekretariat Kabinet dan telah dimanfaatkan dengan baik
3	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM yang melakukan evaluasi AKIP internal dengan mengikutsertakannya dalam program sosialisasi atau pendidikan dan pelatihan terkait	Telah mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis terkait seluruh rangkaian kegiatan SAKIP (Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja)

Gambar 3.11 Capaian Indikator Kinerja Pertama Sasaran Ketiga Tahun 2023



Apabila dibandingkan dengan target kinerja sebesar 80%, maka capaian kinerja indikator kinerja pertama pada sasaran ketiga Biro AKRB tahun 2023 ini adalah sebesar 125% dengan predikat **Memuaskan**.

IK2

Persentase pemenuhan data dukung LKE PMPRB Deputy Bidang Administrasi

Pemenuhan data dukung LKE PMPRB Deputy Bidang Administrasi memperlihatkan peran Biro AKRB dalam mengawal pelaksanaan RB di lingkungan Kedeputan Bidang Administrasi. Indikator kedua pada sasaran ketiga digunakan untuk memastikan pemenuhan data dukung LKE PMPRB Deputy Bidang Administrasi untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi PMPRB. Hasil PMPRB tingkat unit kerja akan mendukung nilai PMPRB tingkat K/L.

Penilaian PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan oleh Tim Asesor. Berdasarkan hasil reviu pada tahun 2023, melalui hasil *Quality Assurance* dari Inspektorat atas hasil reviu Rencana Strategis Deputy Bidang Administrasi Tahun 2020-2024 pada Agustus 2023, Indikator Kinerja ini dianggap sudah tidak relevan untuk dijadikan indikator kinerja, dikarenakan penilaian RB berfokus pada RB General dan RB Tematik, dimana RB General terdiri dari indeks SPBE, tingkat capaian kinerja AKIP, dan tingkat akuntabilitas keuangan. Namun, karena indikator kinerja ini sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro AKRB Tahun 2023 pada Januari 2023, capaian kinerja ini menggunakan hasil evaluasi atas tahun 2022.

Sesuai Memorandum Inspektur Nomor M.448/Insp/12/2022 tanggal 29 Desember 2022 hasil penilaian komponen pengungkit PMPRB Kedeputan Bidang Administrasi adalah 35,12 dengan rincian sebagai berikut.

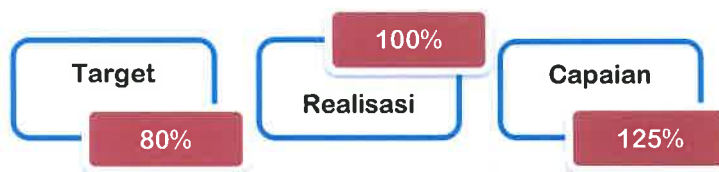
Tabel 3.15 Nilai Komponen Pengungkit PMPRB Kedeputan Bidang Administrasi Tahun 2022

URAIAN		BOBOT	NILAI RB
I	PENGUNGKIT	36,30	35,12
	PEMENUHAN (20)	14,60	14,57
1	Manajemen Perubahan	2,00	2,00
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00
4	Penataan Tata Laksana	1,00	0,97
5	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	1,40	1,40
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50
7	Penguatan Pengawasan	2,20	2,20
8	Peningkatan Pelayanan Publik	2,50	2,50
II	REFORM (30)	21,70	20,55
1	Manajemen Perubahan	3,00	3,00
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00

3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50
4	Penataan Tata Laksana	3,75	3,75
5	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	2,00	2,00
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	2,87
7	Penguatan Pengawasan	1,95	1,68
8	Peningkatan Pelayanan Publik	3,75	3,75

Nilai Pengungkit RB 35,12 jika dibandingkan dengan bobot 36,30 maka persentase PMPRB adalah 96,75%, hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan RB di lingkungan Kedeputan Administrasi sangat baik. Hal ini didukung dari seluruh unit kerja di lingkungan kedeputan Bidang Administrasi yang telah memberikan pemenuhan data dukung 100%. Jika membandingkan target sebesar 80% dan realisasi 100% maka capaian kinerja indikator kinerja kedua pada sasaran ketiga Biro AKRB tahun 2022 ini adalah sebesar 125% dengan predikat **Memuaskan**.

Gambar 3.12 Capaian Indikator Kinerja Kedua Sasaran Ketiga Tahun 2022



SASARAN 4

Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang efektif

Sasaran "Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan kegiatan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang efektif" merupakan salah satu sasaran strategis baru pada PK Biro AKRB di tahun 2022. Sasaran keempat ini dicapai dengan 2 (dua) indikator, antara lain "Indeks revisi program dan anggaran Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi" dan "Persentase penyerapan anggaran pada Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi". Adapun analisis atas capaian kinerja akan diuraikan pada masing-masing indikator kinerja berikut ini.

IK1

Indeks Revisi Program dan Anggaran Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Indikator pertama sasaran keempat digunakan untuk mengukur kualitas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Biro AKRB yang efektif. Semakin sedikit revisi yang diajukan maka semakin baik kualitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Biro AKRB. Berikut rekapitulasi revisi dan capaian yang dicapai.

Tabel 3.16 Rekapitulasi Jumlah Revisi Anggaran Biro AKRB Tahun 2023

No.	Realisasi Revisi Anggaran	Keterangan
1	Nomor : M.0051/Adm-3/01/2023 Tanggal : 24/01/2023	Triwulan 1
2	Nomor : M.0146/Adm-3/02/2023 Tanggal : 27/02/2023	Triwulan 1
3	Nomor : M.0439/Adm-3/07/2023 Tanggal : 07/07/2023	Triwulan 3
4	Nomor : M.0573/Adm-3/09/2023 Tanggal : 29/09/2023	Triwulan 3
5	Nomor : M.0611/Adm-3/10/2023 Tanggal : 19/10/2023	Triwulan 4
6	Nomor : M.0673/Adm-3/11/2023 Tanggal : 24/11/2023	Triwulan 4

Selama tahun 2023, Biro AKRB dapat memenuhi target yang diperjanjikan dalam PK Biro AKRB Tahun 2023 dengan jumlah revisi 6 (enam) kali dengan artian bahwa capaian yang diperoleh sebesar 125% dengan predikat "**Memuaskan**". Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 maka pada tahun 2023 capaian pada indikator pertama sasaran keempat ini meningkat sebesar 12,50%.

Tabel 3.17 Capaian Indikator Kinerja Pertama Sasaran Keempat Tahun 2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2023	5 – 8 Kali Revisi (B)	6 Kali Revisi	125%

Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Keempat Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	5 – 8 Kali Revisi (B)	7 Kali Revisi	112.50%
2023	5 – 8 Kali Revisi (B)	6 Kali Revisi	125%

Adapun hal-hal yang menjadi keberhasilan tercapainya target Indeks Revisi Program dan Anggaran Biro AKRB periode Januari s.d. Desember 2023, antara lain:

1. Program dan anggaran sudah disusun dengan baik sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
2. Efisiensi dan efektifitas dalam menggunakan anggaran untuk kegiatan Biro AKRB menunjukkan indeks revisi masih berada di bawah angka delapan.

IK2**Persentase penyerapan anggaran pada Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi**

Berdasarkan data Realisasi Anggaran yang diambil dari dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), pada tahun 2023 Biro AKRB disokong dengan pagu awal sebesar Rp.7.145.000.000,00 dan setelah direvisi menjadi sebesar Rp. 2.644.908.000,00. Pagu anggaran Biro AKRB, didalamnya termasuk pagu anggaran dukungan penyelenggaraan acara dan kegiatan Sekretaris Kabinet, Wakil Sekretaris Kabinet dan Deputi Bidang Administrasi, serta anggaran Staf Khusus Sekretaris Kabinet dan Staf Ahli Sekretaris Kabinet. Dari total anggaran sebesar Rp. 2.644.908.000,00 yang digunakan untuk pencapaian sasaran Biro AKRB (Bagian Akuntabilitas Kinerja; Bagian Reformasi Birokrasi; dan Bagian Tata Usaha) adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,00. Dari pagu awal sebesar Rp. 1.100.000.000,00 kemudian direvisi sebesar Rp. 328.868.000,00 sehingga pagu akhir menjadi Rp. 771.132.000,003

Realisasi Biro AKRB pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 716.661.698,00 atau sebesar 92,94%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 90% maka capaian kinerja indikator kinerja kedua pada sasaran keempat Biro AKRB tahun 2023 ini adalah sebesar 103,27%. Meskipun persentase realisasi anggaran Biro AKRB di tahun 2023 ini menurun dibandingkan dengan tahun 2022 (96,67%), namun tetap melebihi target yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja.

Tabel 3.19 Capaian Indikator Kinerja Kedua Sasaran Keempat Tahun 2023

Pagu AKRB	Pagu Blokir	Pagu Akhir	Realisasi	% Target	% Realisasi	% Capaian
1.100.000.000	328.868.000	771.132.000	716.661.698	90%	92,94%	103,27%

Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Keempat Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	90%	96,67%	112,74%
2023	90%	92,94%	103,27%

Adapun rincian realisasi anggaran berdasarkan masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21 Realisasi Anggaran Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun 2023

KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	JENIS BELANJA RINCIAN BELANJA	PAGU AWAL TA 2023	ANGGARAN (SETELAH REVISI)	REALISASI	SISA ANGGARAN	Presentase (%) Realisasi s.d. 31 Des 23
5822	Dukungan Manajemen Kinerja Organisasi dan Individu, Reformasi Birokrasi, serta Pengendalian Persuratan dan Ketatausahaan Pimpinan	7.145.000.000	2.644.908.000	2.124.093.956	520.814.044	80,31%
5822.E8D.961	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	734.000.000	334.459.000	329.680.709	4.778.291	98,57%
947.948.949	Bagian Akuntabilitas Kinerja	367.000.000	161.021.000	160.398.392	622.608	99,61%
950.951.952.953	Bagian Reformasi Birokrasi	367.000.000	173.438.000	169.282.317	4.155.683	97,60%
961	Bagian TU Persuratan	366.000.000	436.673.000	386.980.989	49.692.011	88,62%

3.2. Analisis Penggunaan Sumber Daya

3.2.1. Realisasi Anggaran

Biro AKRB menjalankan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet. Pagu awal sebesar Rp.7.145.000.000,00 dan setelah direvisi menjadi sebesar Rp. 2.644.908.000,00. Pagu tersebut termasuk anggaran Staf Ahli Sekretaris Kabinet, Staf Khusus Sekretaris Kabinet, Sekretaris Kabinet, Wakil Sekretaris Kabinet dan Deputi Bidang Administrasi dengan total anggaran setelah revisi sebesar Rp.1.873.776.000,00 sehingga total pagu yang tersedia untuk pencapaian sasaran Biro AKRB adalah sebesar Rp. 771.132.000,00. Anggaran tersebut menopang kegiatan Biro AKRB tahun 2023 berupa dukungan manajemen kinerja organisasi dan individu, reformasi birokrasi, serta pengendalian persuratan dan ketatausahaan pimpinan yang terdiri dari pengelolaan akuntabilitas kinerja, pengelolaan reformasi birokrasi, dan pengelolaan persuratan dan ketatausahaan dengan alokasi anggaran untuk Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Bagian Reformasi sebesar Rp.334.459.000,00 dan Bagian Tata Usaha sebesar Rp.436.673.000,00. Berikut ini tabel perbandingan capaian kinerja dan realisasi anggaran Biro AKRB tahun 2023.

Tabel 3.22 Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Biro AKRB Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN KINERJA**
Meningkatnya kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Jumlah unit kedeputan yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori A	734.000.000	334.459.000	386.980.989	98,57%	100%
	Persentase tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja					99,87%

	Jumlah komponen penilaian reformasi birokrasi yang nilainya meningkat					100%
	Persentase tingkat pemanfaatan dokumen reformasi birokrasi					99.35%
Terselenggaranya layanan persuratan serta ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan	366.000.000	436.673.000	386.980.989	88.62%	100.61%
Meningkatnya kualitas pelaksanaan SAKIP dan RB Kedeputan Bidang Administrasi	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh Unit Kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Administrasi	-	-	-	-	125%
	Persentase pemenuhan data dukung LKE PMPRB Deputi Bidang Administrasi					125%
Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	125%
	Persentase penyerapan anggaran pada Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi					103.26%

*dalam rupiah

**rata-rata capaian indikator kinerja masing-masing sasaran

Jumlah anggaran Biro AKRB setelah revisi pengalihan anggaran menjadi Rp. **771.132.000,00**. Sampai dengan 31 Desember 2023, dengan penyerapan anggaran Biro AKRB sebesar **Rp. 716.661.698,00** atau **92,94%**.

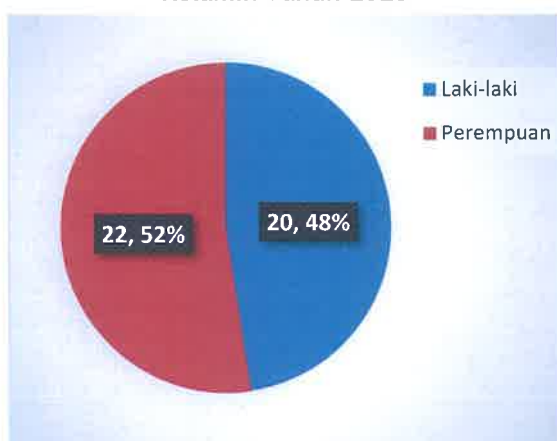
Biro AKRB mampu mencapai target *output*-nya dengan anggaran yang ada. Strategi pencapaian di antaranya dengan mengadakan rapat maupun sosialisasi baik secara daring maupun secara luring, dengan tetap melaksanakan rapat koordinasi di lingkungan Sekretariat Kabinet secara tatap muka yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang baik. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai

Kabinet secara tatap muka yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang baik. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai sasaran dapat dilihat dari pencapaian target, di mana rata-rata capaian kinerja sebesar **103,26%** (**Memuaskan**).

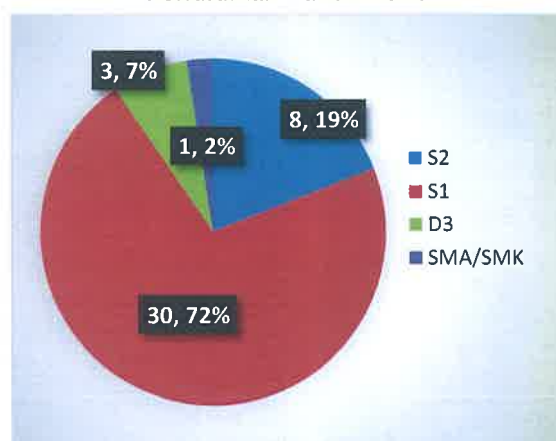
3.2.2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2023, Biro AKRB didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang tidak termasuk Pegawai Tidak Tetap sebanyak 11 (sebelas) orang.

Gambar 3.13 Diagram Profil Pejabat dan Pegawai Biro AKRB Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023



Gambar 3.14 Diagram Profil Pejabat dan Pegawai Biro AKRB Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023



3.2.3. Sarana Prasarana

Sarana Alat Pengolah Data (APD) yang dimiliki Biro AKRB sudah cukup untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai. Biro AKRB juga telah diberikan 2 (dua) buah laptop dan 2 (dua) buah kendaraan untuk operasional Biro. Tahun 2023 juga telah diberikan tambahan *personal computer* (PC) sebanyak 1 (satu) unit untuk menggantikan PC yang sudah rusak dan 1 (satu) unit *printer* untuk kebutuhan Kepala Biro AKRB agar dapat memudahkan tugas dan fungsi sehari-hari. Serta penyediaan 2 (dua) kamar mandi yang selesai di TW I tahun 2023.



BAB IV PENUTUP



BAB IV PENUTUP

LKj Biro AKRB Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban Kepala Biro AKRB kepada Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet yang telah memberikan amanah dan tugas atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2023. Empat sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen PK tahun 2023 dapat dicapai sepenuhnya. Laporan ini menyajikan capaian kinerja mencakup 4 (empat) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. Berdasarkan rata-rata capaian indikator masing-masing sasaran, keempat sasaran masuk dalam kategori memuaskan, walaupun ada 2 (dua) indikator kinerja termasuk dalam kategori sangat baik. Sasaran pertama “Meningkatnya kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet” memperoleh capaian kinerja sebesar **104,80%** termasuk dalam kategori “**Memuaskan**”, sasaran kedua “Terselenggaranya layanan persuratan serta ketatausahaan pimpinan” memperoleh capaian **100,61%** termasuk dalam kategori “**Memuaskan**”, sasaran ketiga “Meningkatnya kualitas pelaksanaan SAKIP dan RB Kedeputan Bidang Administrasi” memperoleh capaian **125%** termasuk dalam kategori “**Memuaskan**”, dan sasaran keempat “Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang efektif” memperoleh capaian **114,13%** termasuk dalam kategori “**Memuaskan**”. Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa capaian Biro AKRB dengan rata-rata capaian **110,89%** berada pada kategori “**Memuaskan**”.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan hasil memuaskan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Oleh karena itu, upaya penyempurnaan dan perbaikan harus terus dilakukan. Ke depan, seperti tahun sebelumnya, diharapkan terdapat peningkatan perbaikan mekanisme dan prosedur kerja, penggunaan aplikasi secara optimal, serta peningkatan kompetensi pegawai Biro AKRB, untuk memastikan Biro AKRB mampu mendorong implementasi SAKIP dan reformasi birokrasi yang lebih baik lagi.

Penyempurnaan dapat dilakukan dengan menambahkan indikator kinerja yang lebih berkualitas serta target yang menantang agar memiliki motivasi untuk capaian kinerja yang lebih baik lagi. Selain itu, identifikasi permasalahan serta mencari upaya penyelesaian juga perlu dilakukan agar tidak menghambat dalam pencapaian kinerja kedepannya. Kapasitas dan kompetensi pejabat/pegawai di Biro AKRB perlu ditingkatkan guna menunjang penyelesaian pekerjaan dan pencapaian kinerja yang lebih baik lagi, serta menyikapi perkembangan peraturan terbaru terkait pelaksanaan SAKIP dan RB.

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Biro AKRB pada Tahun 2024, beberapa rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain:

- 
1. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan unit kerja dalam berbagai kegiatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan RB dalam rangka peningkatan komitmen seluruh pejabat dan pegawai di Sekretariat Kabinet dalam penyusunan dan monitoring serta evaluasi *Road Map* RB, Rencana Aksi RB, *Risk Register*, Rencana Penanganan Risiko, dokumen Renstra, IKU, PK, LKj, SKP, dan penilaian capaian data kinerja triwulanan baik secara formal (memorandum dan rapat), maupun secara informal (*whatsapp* grup khusus SAKIP).
 2. Melakukan pendampingan terkait pengisian dan/atau penyusunan dokumen AKRB dengan mengundang narasumber dari Kementerian PANRB maupun BKN untuk melakukan asistensi serta mensosialisasikan ke seluruh unit kerja.
 3. Agar dibuat data center untuk menyimpan dokumen-dokumen RB dan dokumen kinerja secara digital dan dapat diakses oleh seluruh pegawai.
 4. Agar tercipta suatu inovasi dalam pengendalian persuratan dan ketatausahaan, sehingga memudahkan segala hal yang berkenaan dengan bidang persuratan.
 5. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM di Biro AKRB dengan mengikutsertakan pejabat dan pegawai dalam program pendidikan dan pelatihan yang menunjang kemampuan teknis serta *soft skill*.

Diharapkan laporan kinerja digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan implementasi pada Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Biro AKRB. Oleh karena itu, penyempurnaan juga masih harus terus dilakukan guna meningkatkan kualitas laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, informasi yang tersaji dalam LKj Biro AKRB diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan yang bermanfaat sebagai bahan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan organisasi, bagi Deputi Bidang Administrasi sebagai pemberi amanah, maupun bagi seluruh *stakeholders* terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro AKRB dalam memberikan dukungan kepada organisasi Sekretariat Kabinet.



**LAMPIRAN 1: PERJANJIAN KINERJA BIRO
AKRB TAHUN 2022**

**LAMPIRAN 2: MATRIKS CAPAIAN KINERJA
BIRO AKRB TAHUN 2022**

**LAMPIRAN 3: PENYERAPAN ANGGARAN
BIRO AKRB TAHUN 2022**

**LAMPIRAN 4: PENGEMBANGAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA BIRO
AKRB TAHUN 2022**

**LAMPIRAN 5: FORMULIR CHECKLIST
MUATAN SUBSTANSI LAPORAN
KINERJA BIRO AKRB TAHUN
2023**



**PERJANJIAN KINERJA BIRO AKRB
TAHUN 2023**



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendry Prihandono, S.Kom., M.Kom.

Jabatan : Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.

Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

Farid Utomo, S.H., M.H.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan
Reformasi Birokrasi

Hendry Prihandono, S.Kom., M.Kom.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO AKUNTABILITAS KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Jumlah unit ke deputian yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori A	5 Unit Kerja
		Persentase tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja	82 Persen
		Jumlah komponen penilaian reformasi birokrasi yang nilainya meningkat	6 Komponen
		Persentase tingkat pemanfaatan dokumen reformasi birokrasi	82 Persen
2	Terselenggaranya layanan persuratan serta ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet	Persentase kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan	82 Persen
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan SAKIP dan RB Kedeputan Bidang Administrasi	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh Unit Kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Administrasi	80 Persen
		Persentase pemenuhan data dukung pelaksanaan reformasi birokrasi Deputi Bidang Administrasi	80 Persen
4	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	B (5-8 Kali Revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Kinerja Organisasi, Reformasi Birokrasi, dan Ketatausahaan

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Perencanaan kinerja organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet | Rp231.147.000,- |
| 2. Pemantauan, pengukuran, dan pelaporan kinerja | Rp102.025.000,- |
| 3. Pengembangan sistem manajemen kinerja | Rp33.828.000,- |
| 4. Perencanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet | Rp58.800.000,- |
| 5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet | Rp242.244.000,- |

- | | |
|--|--------------------------|
| 7. Pengkajian dan pengembangan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet | Rp52.456.000,- |
| 8. Dukungan pelayanan dan administrasi ketatausahaan dan persuratan | Rp366.000.000,- |
| Total Anggaran | Rp1.100.000.000,- |

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi



Farid Utomo, S.H., M.H.

Jakarta, 02 Januari 2023
Pihak Pertama,
Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi



Hendry Prihandono, S.Kom., M.Kom.

Lampiran 2

MATRIKS CAPAIAN KINERJA BIRO ACRB TAHUN 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Kinerja	Program	Pagu	Realisasi	%	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Jumlah unit kedeputan yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori "A"	5 Unit Kerja	6 Unit Kerja	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	Rp. 334.459.000	Rp. 329.680.709	98,57%	
	Persentase tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja	82%	81,89%					99,87%
	Jumlah komponen penilaian reformasi birokrasi yang nilainya meningkat	6 Komponen	6 Komponen					100%
	Persentase tingkat pemanfaatan dokumen reformasi birokrasi	82%	81,47%					99,35%
	Persentase tingkat kepuasan layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan	82%	82,50%					100,61%
Terselenggaranya layanan persuratan serta ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet					Rp. 436.673.000	Rp. 386.980.989	88,62%	

Lampiran 3

PENYERAPAN ANGGARAN BIRO AKRB TAHUN 2023

Total Anggaran Biro AKRB Tahun 2023: Rp. 2.644.908.000

UNIT ORGANISASI/ UNIT KERJA/ BAGIAN	PAGU ANGGARAN SETELAH REVISI	PENYERAPAN	PERSEN PENYERAPAN
Sekretaris Kabinet	Rp. 217.460.000	Rp. 156.863.700	72,13%
Wakil Sekretaris Kabinet	Rp. 251.902.000	Rp. 225.130.687	89,37%
Deputi Bidang Administrasi	Rp. 902.896.000	Rp. 703.945.874	77,97%
Staf Ahli Sekretaris Kabinet	Rp. 281.905.000	Rp. 161.616.214	57,33%
Staf Khusus Sekretaris Kabinet	Rp. 219.613.000	Rp. 159.875.783	72,80%
Bagian Akuntabilitas Kinerja	Rp. 161.021.000	Rp. 160.398.392	99,61%
Bagian Reformasi Birokrasi	Rp. 173.438.000	Rp. 169.282.317	97,60%
Bagian Tata Usaha	Rp. 436.673.000	Rp. 386.980.989	88,62%
TOTAL	Rp. 5.013.732.000	Rp. 3.870.094.944	77,19%

Rincian Anggaran yang Dipergunakan untuk Pencapaian Sasaran Biro AKRB Tahun 2023

SASARAN	PAGU ANGGARAN SETELAH REVISI	PENYERAPAN	PERSEN PENYERAPAN
Meningkatnya kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp. 334.459.000	Rp. 329.680.709	98,57%
Bagian Akuntabilitas Kinerja	Rp. 161.021.000	Rp. 160.398.392	99,61%
Bagian Reformasi Birokrasi	Rp. 173.438.000	Rp. 169.282.317	97,60%
Terselenggaranya layanan persuratan serta ketatausahaan pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp. 436.673.000	Rp. 386.980.989	88,62%
Bagian Tata Usaha	Rp. 436.673.000	Rp. 386.980.989	88,62%

Lampiran 4**PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
BIRO AKRB TAHUN 2023****PELATIHAN**

NO	NAMA DIKLAT	PESERTA	WAKTU	LOKASI
Juni				
1	Keterampilan Menulis Efektif di Lingkungan Pemerintahan	Sri Andini Piningransih, S.M. Riana Theresa Nainggolan, S.E.	11 s.d. 14 Juni 2023	Bandung
Juli				
1	ISO 27001:2022 ISMS Foundation	Dikri Faisal, S.H.	3 s.d. 6 Juli 2023	Makasar
2	Smart Coaching and Mentoring	Bagas Putranto, S.I.Kom., S.H., M.AP. Komarudin, S.AP., M.M.	11 s.d.12 Juli 2023	Bogor
3	English For Business	Fathin Abiyyu Desha, S.E. Mochamad Musya Sultani Hasan, S.Ak.	24 s.d.28 Juli 2023	Bogor

Lampiran 5

FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA BIRO AKRB TAHUN 2023

No.	Pernyataan			Checklist
I	Format	1	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	√
		2	LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	√
		3	LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	√
		4	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme Penyusunan	1	LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggu Jawab Akuntabilitas Kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	√
		2	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3	Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√
		4	Data Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
III	Substansi	1	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	√
		2	Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	√
		3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4	Indikator Kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	√
		5	Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	√
		6	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	√